

**PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP APBD
TAHUN 1996-2000 DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Maria Magdalena Sribejani

NIM : 972114204

NIRM : 970051121303120189

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2002

Skripsi
PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP APBD
TAHUN 1996-2000 DI KABUPATEN SLEMAN

Oleh:

Maria Magdalena Sribejani

NIM : 972114204

NIRM : 970051121303120189

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

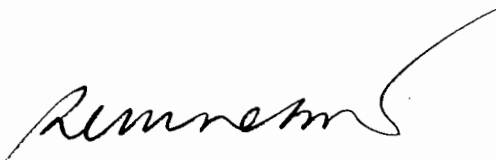
Tanggal: 18 Mei 2002



Dionysius Desembriarto, S.E., M.Si.

Pembimbing II

Tanggal: 11 Mei 2002



Fr. Reni Retno A., S.E., M.Si., Ak.

S k r i p s i
PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP APBD
TAHUN 1996-2000 DI KABUPATEN SLEMAN

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Maria Magdalena Sribejani

NIM : 972114204

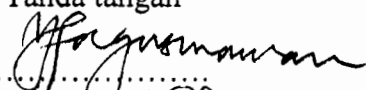
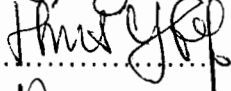
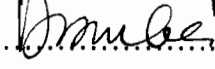
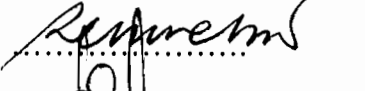
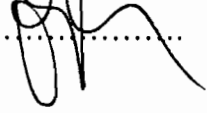
NIRM : 970051121303120189

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 22 Juni 2002

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda tangan
Ketua	Dra. YF. Gien Agustinawansari, M.M., Ak.	
Sekretaris	Ir. Drs. Hansiadi YH., M.Si., Ak.	
Anggota	Dionysius Desembriarto, S.E., M.Si.	
Anggota	Fr. Reni Retno A., S.E., M.Si., Ak.	
Anggota	Drs. P. Rubiyatno, M.M.	

Yogyakarta, 22 Juni 2002

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Drs. H. Suseno TW., M.S.

PERSEMBAHAN

*Kita sadar bahwa apa yang kita capai hanyalak setetes air di lautan luas,
tetapi jika tetesan ini tidak jatuh dilautan luas ia akan hilang*

Mather Teresa

Skripsi ini kupersembahkan buat:

- *Bapak dan ibu tercinta*
- *Kakaku mbak Yuni, mas Sriono, dan mas Thomas*
- *Keponakanku puput, yani, dan si kecil wivied*

PERNYATAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 22 Juni 2002

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Magda' with a stylized flourish.

Maria Magdalena Sribejani

ABSTRAK

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP APBD TAHUN 1996-2000 DI KABUPATEN SLEMAN

STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

MARIA MAGDALENA SRIBEJANI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2002

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui apakah pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman cukup atau tidak jika dilaksanakan otonomi daerah. (2) Mengetahui perkembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah dari tahun 1996/1997-Desember 2000 dan prediksi pendapatan asli daerah tahun 2001-2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada pemerintah daerah tingkat II Sleman. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung kontribusi (peranan) PAD dalam APBD. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui upaya-upaya peningkatan penerimaan PAD.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa (1) Selama lima periode terakhir kontribusi PAD masih rendah yaitu 15% sampai dengan 16%, sehingga belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. (2) Prediksi PAD dan APBD untuk tahun-tahun mendatang belum memungkinkan untuk pelaksanaan otonomi daerah dimana pertumbuhan PAD tertinggi 25% dan pertumbuhan APBD mencapai 33%. (3) Faktor dominan dalam PAD yaitu pajak sebesar 68% dan retribusi 27%. (4) Perkembangan sektor-sektor PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pajak daerah mengalami penurunan, retribusi mengalami penurunan, bagian laba dari BUMD mengalami peningkatan dan penerimaan lain-lain mengalami peningkatan dan penurunan.

ABSTRACT

THE ROLE OF ACTUAL REGIONAL REVENUE TOWARD REGIONAL BUDGET FROM 1996 TO 2000 A CASE STUDY AT THE GOVERNMENT OF SLEMAN REGENCY

MARIA MAGDALENA SRIBEJANI
SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2002

The research was proposed to (1) know whether or not the actual regional revenue in Sleman Regency was enough if regional autonomy was applied, (2) know the development of actual regional revenue sources from 1996/1997-December 2000 and the prediction of actual regional revenue in 2001-2010. The research was a case study at government of Sleman Regency. The data collection that was applied were quantitative and qualitative analysis. The quantitative analysis was used to calculate the contribution (role) of actual regional revenue the Government Budget. The qualitative analysis was used to know the efforts to increase Actual Regional Revenue.

Based on the data analysis applied, there were some conclusion gathered (1) during the last five periods the contribution of actual regional revenue was low, that was 15% up to 16%, so that it was yet reliable as the expenditure source of regional autonomy application. (2) The prediction of Actual Regional Receipts and Regional Budget for the next few year was not yet applicable for the regional autonomy in which the highest Actual Regional Revenue growth was 25% and BRER growth was 33%. (3) The dominant factors in ARR sector were tax 68% and revenue for service 27%. (4) The development of ARR sector from year was fluctuated. The regional tax decreased, the revenue for service decreased, the profit from regional manufacture increased and the other revenue increased and decreased.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD Tahun 1996-2000 di Kabupaten Sleman. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Keberhasilan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Hg Suseno TW., M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
2. Bapak Dionisius Desembriarto, S.E, M.Si. selaku pembimbing I yang telah memberikan saran usulan dan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
3. Ibu Fr. Reni Retno A., S.E., M.Si., Ak. Selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing penulis memberikan masukan usulan saran hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs. Titus Odong Kusumajati, M.A. yang telah memberikan masukan dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Drs. P. Rubiyatno, M.M. selaku wali kelas 97"C".
6. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi USD yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama kuliah.

7. Staf sekretariat Fakultas Ekonomi USD atas kerjasamanya hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Pimpinan dan Karyawan DIPENDA Kabupaten Sleman yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi.
9. Bapak dan Ibu tercinta atas doa dan dukungan berupa materi dan spiritual.
10. Buat kakak-kakakku mbak Yuni, mas Sriono, mas Thomas atas doa dan dukungannya.
11. Dhesi, Prita, Yoko terima kasih atas pinjaman buku dan komputernya.
12. Teman-teman KSR PMI Unit VI khususnya Avin, Aris, Rini *Tombol*, Jito, Antok, Bowo dan yang lain yang tidak dapat kusebut satu persatu terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, *kompak selalu*.
13. Reni, Reta dan Marsel terimakasih atas persahabatannya.
14. Teman-teman kost Argulo 7, Hening, Sheen-ta, Sintut, Ina, Atik, Santi dan Erit terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini
15. Teman-teman AKT'97 C terima kasih atas persahabatannya.
16. Seseorang yang telah memberikan kasih sayangya, perhatiannya, dan dukungannya hingga terselesaikanya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 22 Juni 2002

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II. LANDASAN TEORI	6
A. Pendapatan Asli Daerah	6
1. Pengertian.....	6
2. Sumber-sumber PAD	6
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	8
1. Pengertian.....	8
2. Penyusunan APBD.....	10
3. Fungsi-fungsi Anggaran.....	10
4. Susunan APBD.....	11
5. Pos-pos Anggaran	11

6. Sistem Akuntansi, Laporan yang dihasilkan dan Pemakai Laporan Keuangan Daerah.....	13
C. Otonomi Daerah.....	14
1. Pengertian.....	14
2. Tujuan Pemberian Otonomi Daerah	14
3. Sasaran Otonomi Daerah	14
4. Perimbangan Antara Keuangan Pusat dan Daerah	14
5. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah.....	16
6. Tolok Ukur Otonomi Daerah.....	17
7. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah.....	17
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
C. Subyek dan Obyek Penelitian	19
D. Teknik Pengumpulan Data.....	19
E. Teknik Analisis Data.....	20
BAB IV. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH	
DAERAH TINGKAT II SLEMAN	24
A. Geografi.....	24
B. Kependudukan.....	25
C. Kondisi Wilayah.....	26
D. Perekonomian.....	28
E. Pemerintahan.....	30
BAB V. PEMBAHASAN.....	31
A. Perbandingan PAD dan APBD	31
B. Perkembangan PAD Total tahun 1996-2000	35
Perkembangan Pajak Daerah tahun 1996-2000	37
Perkembangan Retribusi tahun 1996-2000	40
Perkembangan Bagian Laba BUMD tahun 1996-2000	43
Perkembangan Penerimaan Dinas tahun 1996-1998.....	46
Perkembangan Penerimaan Lain-lain tahun 1996-2000	49

C. Prediksi Penerimaan PAD.....	52
Prediksi Penerimaan Pajak tahun 2001-2010.....	53
Prediksi Penerimaan Retribusi tahun 2001-2010.....	56
Prediksi Penerimaan Laba BUMD tahun 2001-2010.....	59
Prediksi Penerimaan Lain-lain tahun 2001-2010.....	62
Prediksi Penerimaan PAD total tahun 2001-2010	65
BAB VI. PENUTUP	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	15
Tabel 5.1 Perkembangan PAD dengan APBD Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000	32
Tabel 5.2 Perkembangan PAD Total Tahun Anggaran 1996/1997- Desember 2000.....	36
Tabel 5.3 Perkembangan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1996/1997- Desember 2000.....	38
Tabel 5.4 Perkembangan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000	41
Tabel 5.5 Perkembangan Bagian Laba BUMD Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000	44
Tabel 5.6 Perkembangan Penerimaan Dinas Tahun Anggaran 1996/1997-1998/1999	47
Tabel 5.7 Perkembangan Penerimaan Lain-lain Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000	50
Tabel 5.8 Perhitungan Trend Pajak Daerah	53
Tabel 5.9 Perhitungan Trend Pendapatan Retribusi.....	56
Tabel 5.10 Perhitungan Trend Pendapatan Laba BUMD	59
Tabel 5.11 Perhitungan Trend Pendapatan Lain-lain.....	62
Tabel 5.12 Perhitungan Trend Pendapatan APBD.....	68

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 5.1 Perkembangan PAD Total Tahun Anggaran 1996/1997- Desember 2000.....	37
Grafik 5.2 Perkembangan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1996/1997- Desember 2000.....	39
Grafik 5.3 Perkembangan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000	42
Grafik 5.4 Perkembangan Bagian Laba BUMD Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000	45
Grafik 5.5 Perkembangan Penerimaan Dinas Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000	48
Grafik 5.6 Perkembangan Penerimaan Lain-lain Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000	51
Grafik 5.7 Prediksi Pajak Daerah Tahun 2001-2010	56
Grafik 5.8 Prediksi Retribusi Daerah Tahun 2001-2010	59
Grafik 5.9 Prediksi Penerimaan Bagian Laba BUMD Tahun 2001-201 ..	62
Grafik 5.10 Prediksi Penerimaan Lain-lain Tahun 2001-2010	65
Grafik 5.11 Prediksi PAD Total Tahun 2001-2010	67
Grafik 5.12 Perkembangan PAD Total dan APBD Tahun 2001-2010	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan daerah yang efektif. Sistem yang diperlukan tidak saja sebagai alat untuk melaksanakan program pemerintah tetapi yang lebih penting supaya masyarakat dapat berperan serta dalam menentukan pembangunan daerahnya sendiri. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah dipandang perlu untuk diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan memanfaatkan potensi daerah yang ada. Dengan demikian masyarakat setempat diharapkan dapat berperan serta mengembangkan aspirasi dalam memajukan daerahnya masing-masing sesuai dengan tuntutan kebutuhannya.

Untuk itu pemerintah daerah dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah diperlukan dana yang besar untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerahnya dan dana yang cukup dari daerahnya sendiri, maka semua tugas-tugas pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan demikian pemerintah daerah dapat melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan.

Dari hal tersebut di atas menunjukkan bahwa salah satu sumber dana pemerintah adalah pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mengelola semaksimal mungkin faktor-faktor yang

menjadi sumber pendapatannya. Saat ini yang menjadi permasalahan serius bagi daerah adalah kondisi daerah yang bervariasi. Adanya faktor-faktor dari perbedaan geografis, potensi sumber daya alam (SDA), potensi sumber daya manusia (SDM), dan perbedaan kewenangan yang diberikan. Dengan keadaan tersebut di atas dimungkinkan daerah tidak siap dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil penelitian tentang pendapatan asli daerah (PAD) yang diberitakan dalam Jawa Pos Tanggal 17 Oktober 1994 yang menyebutkan bahwa dari 290 daerah tingkat II di pulau Jawa hanya 5 daerah tingkat II yang benar-benar memiliki kemandirian dalam melaksanakan otonomi daerah diukur dari 50 % sumbangan pendapatan asli daerah terhadap APBD. Penelitian lain dari FISIPOL UGM yang menyebutkan bahwa sumbangan PAD dalam tahun 1986-1990 terhadap APBD daerah tingkat II di Jawa Tengah paling tinggi 30%. Dan pada tahun 1996-1998 hanya ada 4 daerah di Jawa Tengah yang sumbangan pendapatan asli daerahnya terhadap APBD di atas 30 %.

Dari keadaan tersebut di atas maka pemerintah daerah harus mengetahui sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat memberikan sumbangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah agar dapat mengelola dan meningkatkan daerahnya sendiri. Bertitik tolak dari pentingnya pendapatan asli daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah di daerah agar dapat memaksimalkan faktor-faktor sumber pendapatan asli daerah yang ada maka,

penulis memilih judul *Peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman cukup untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah ?
2. Bagaimana perkembangan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman?

C. Pembatasan Masalah

Dari rumusan masalah tersebut di atas penulis membatasi masalah yaitu:

1. Yang diteliti adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman
2. Periode yang diteliti adalah tahun 1996-2000

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman cukup atau tidak untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui perkembangan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola keuangan pemerintah daerah serta menjadi bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan menambah koleksi dan tambahan referensi terhadap masalah keuangan daerah.

3. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan pengetahuan dibidang keuangan daerah dan dapat menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan keadaan yang sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori dari hasil studi pustaka yang dijadikan dasar untuk menganalisis data yang diperoleh.

BAB III . METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, subyek penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

Berisi tentang keadaan pemerintahan Kabupaten Sleman secara umum berdasarkan data-data yang diperoleh.

BAB V. PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis data yang diperoleh dari DIPENDA Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode dan teknik yang diuraikan dalam metodologi penelitian.

BAB VI. PENUTUP

Kesimpulan dari seluruh langkah-langkah proses pembahasan dan analisis data dari hasil penelitian serta berisi beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, pungutan jasa layanan, iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahaan daerah dan penerimaan pembangunan yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. (Nick Devas, 1989: 31)

2. Sumber pendapatan asli daerah

Berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 1999 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah, yaitu:

1. Pajak daerah

Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah daerah yang dipaksakan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

Jenis-jenis pajak daerah seperti:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

- f. Pajak Penerangan Jalan
- g. Pajak Air Bawah Tanah

2. Retribusi

Yang dimaksud dengan retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah daerah dimana kita dapat melihat secara langsung adanya hubungan balas jasa yang diterima karena adanya pembayaran retribusi tersebut.

Jenis-jenis retribusi adalah:

- a. Retribusi ijin bangunan
 - b. Retribusi rumah sakit dan pelayanan kesehatan
 - c. Retribusi pasar
 - d. Retribusi parkir
 - e. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - f. Retribusi ijin trayek kendaraan penumpang
 - g. Retribusi izin pelayanan dan pengendalian
- ## 3. Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penerimaan ini berasal dari BPD, dan Perusahaan Daerah

4. Pendapatan dinas

Pendapatan dinas adalah penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari retribusi dan pajak daerah

misalnya dari dinas pertanian, dinas peternakan, dinas kesehatan, dinas perikanan dan dinas lainnya.

b. Dana perimbangan

Yang termasuk dalam dana perimbangan adalah:

1. Bagian dari pajak bumi dan bangunan
2. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
3. Dana alokasi umum
4. Dana alokasi khusus
5. Penerimaan dari sumber daya alam

c. Pinjaman daerah

1. Pinjaman dari luar negeri
2. Pinjaman dari dalam negeri

d. Lain-lain pendapatan yang sah

1. Hibah
2. Penerimaan dari daerah propinsi/kabupaten lainnya

B. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

1. Pengertian

Anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. (Suparmoko,1987:149)

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari aktifitas normal perusahaan selama satu periode. (SAK: No 23)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan perwujudan daripada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang diukur dan dihitung dengan uang. (Djoefri Abdullah, 1984: 3)

Anggaran pendapatan daerah adalah suatu rencana penerimaan dan pengeluaran atau belanja daerah dalam jangka waktu tertentu. (Suparmoko, 1987:49)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut D.J Mamesah (1995:20) adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain yang menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutup pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

2. Penyusunan Anggaran

Kegiatan penyusunan anggaran pembangunan dibagi dalam langkah-langkah sebagai berikut: (Nick Devas, 1989:291)

1. Maret-Juni

Pemerintah daerah tingkat II mengumpulkan usulan anggaran dari desa-desa bekerjasama dengan semua lembaga dan merencanakan anggaran daerah sementara.

2. Juni-Oktober

Pembahasan rencana anggaran.

3. November

Daerah tingkat II menyampaikan usulan rencana anggaran ke daerah tingkat I.

4. Februari

Keputusan pemerintah pusat mengenai bantuan dan proyek disampaikan kepada pemerintah daerah.

5. Maret-Mei

Menyiapkan rencana anggaran daerah tingkat II.

6. April-Juni

Gubernur daerah tingkat I menyetujui anggaran daerah tingkat II.

3. Fungsi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2002:63-66) fungsi anggaran adalah:

- a. Sebagai alat perencanaan
- b. Sebagai alat pengendalian
- c. Sebagai alat kebijakan fiskal
- d. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi
- e. Sebagai alat penilaian kinerja
- f. Sebagai alat motivasi
- g. Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

4. Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Djoefri Abdullah, 1984:3)

Kegiatan yang dilakukan dalam pemerintah daerah dibagi menjadi dua yaitu kegiatan yang terus menerus dan tidak ada batas akhirnya dan kegiatan yang ada batas akhirnya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berkenaan dengan kegiatan yang terus menerus dilakukan disebut anggaran pendapatan dan belanja rutin daerah dan anggaran pendapatan dan belanja pembangunan yang berkenaan dengan kegiatan yang ada batas akhirnya.

5. Pos-pos anggaran (Nick Devas, 1989:26-34)

Pos anggaran dibagi menjadi dua bagian yaitu anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran.

- a. Anggaran penerimaan menunjukkan jumlah penerimaan yang ditargetkan pada satu tahun anggaran tertentu.

Anggaran penerimaan dikelompokkan berdasarkan sumbernya yaitu:

1. Anggaran penerimaan rutin (penerimaan dalam negeri)
 - a. Penerimaan dari pusat atau dari propinsi
 - b. Pendapatan asli daerah
 - c. Pinjaman daerah
 - d. Sisa lebih anggaran tahun lalu
2. Penerimaan pembangunan
 - a. Bantuan dari pusat
 - b. Pendapatan pembangunan

- c. Pendapatan asli daerah untuk pembangunan
 - d. Pinjaman daerah untuk pembangunan
- b. Anggaran pengeluaran menunjukkan jumlah pengeluaran yang ditargetkan untuk tahun anggaran tertentu.

Anggaran pengeluaran dikelompokkan berdasarkan jenis pengeluarannya yaitu:

1. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran untuk membelanjai pengeluaran yang terus menerus dilakukan daerah.
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang
 - c. Belanja pemeliharaan
 - d. Belanja pengeluaran dinas
 - e. Belanja lain-lain
2. Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai.

Yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan yaitu:

- a. Bidang ekonomi
- b. Bidang perhubungan
- c. Bidang sosial
- d. Bidang umum
- e. Subsidi pembangunan kepada daerah bawahannya
- f. Pembayaran kembali pinjaman

6. Sistem Akuntansi, Laporan yang dihasilkan dan Pemakai Laporan Keuangan Daerah (Abdul Halim, 2001:22-23)

Sistem akuntansi yang digunakan adalah *accrual basis* dimana dasar akuntansi ini mengakui transaksi pada saat transaksi terjadi.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Laporan perhitungan APBD
2. Nota Perhitungan APBD
3. Laporan Aliran Kas
4. Neraca Daerah

Pemakai laporan keuangan daerah adalah:

1. DPRD
2. Badan Eksekutif
3. Badan Pengawas Keuangan
4. Investor, kreditor dan donatur
5. Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah
6. Rakyat
7. Pemerintah Pusat

C. Otonomi Daerah

1. Pengertian

Menurut undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan daerah adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan dan agama.

2. Tujuan Pemberian Otonomi Daerah (Maskun, Sumitro 2001: 224)

- a. Agar daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
- b. Untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Sasaran Otonomi Daerah (Maskun, Sumitro 2001: ~~224~~)

Sasaran otonomi daerah adalah daerah tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat

4. Perimbangan antara Keuangan Pusat dan Daerah

Menurut undang-undang No.25 tahun 1999 perimbangan antara keuangan pusat dan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

No	Jenis Pendapatan	Pusat (%)	Daerah (%)
1	Pajak bumi dan bangunan	90	10
2	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	20	80
3	SDA kehutanan		
	Iuran Hak perusahaan hutan	20	80
	Propinsi 16 %, Kota penghasil 64%		
	Sumber daya hutan		
	Propinsi 16 %, Kota penghasil 32%, Kota lainnya 32%	20	80
4	SDA pertambangan umum		
	Iuran tetap	20	80
	Propinsi 16%, Kota penghasil 64%		
	Iuran eksplorasi dan eksploitasi	20	80
	Propinsi 16%, Kota penghasil 32%, Kota lainnya 32%		
	SDA pertambangan Minyak	85	15
	Propinsi 3%, Kota penghasil 6%, Kota lainnya 6%		
	SDA Gas Alam	70	30

	Propinsi 12%, Kota penghasil 12%, Kota lainnya 12%		
5	SDA Perikanan Pungutan perusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan (dibagi secara merata seluruh kota)	20	80

5. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah menurut undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah:
- a. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi serta keanekaragaman daerah.
 - b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab.
 - c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas untuk diletakkan pada daerah kabupaten dan kota.
 - d. Otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.
 - e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom.
 - f. Pelaksanaan otonomi daerah lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

6. Tolok Ukur Otonomi Daerah

Menurut Nota Keuangan RAPBN/ 1991/1992 yang menjadi tolok ukur pelaksanaan otonomi daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Dimana kemampuan otonomi daerah diukur dari kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kontribusi PAD dalam APBD, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Miftah Thoha menemukan bahwa dari 290 DATI II hanya 5 DATI II yang memiliki kemandirian diukur dari 50% sumbangan PAD terhadap APBD (Kakisina & Rumansara, 2000: 67)

Menurut Labadjo (2001: 173), jika Dinas Pendapatan Daerah meningkatkan pungutan khususnya pajak menjadi 50% maka kontribusi pendapatan asli daerah untuk APBD akan meningkat.

7. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah

(Silalahi, T.B 2000: 12)

- a. Masing-masing daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya.
- b. Semua urusan pemerintah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan layak untuk diserahkan kepada daerah tingkat II telah dilaksanakan.
- c. Perangkat peraturan berupa peratuar pemerintah tentang penyerahan urusan telah ditinjau kembali dan diselaraskan dengan nuansa pembangunan yang diarahkan GBHN.

- d. Pendapatan asli daerah yang meningkat memungkinkan untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan perekonomian daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi : Penelitian dilakukan di Pemerintah daerah tingkat II
Kabupaten Sleman

Waktu : 23 Oktober-23 Desember 2001

C. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah sub dinas pendapatan dan dinas anggaran daerah.

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah pendapatan asli daerah dan data anggaran pendapatan belanja daerah.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan melihat yang akan diteliti.

3. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti serta bagian-bagian yang akan dilakukan. Metode ini digunakan untuk memperjelas serta untuk membuktikan data-data yang diperoleh melalui metode dokumentasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Teknik analisis kuantitatif yaitu menganalisis data dengan menggunakan angka-angka.
2. Teknik analisis kualitatif yaitu teknik menganalisis data dengan berbasis pada data kuantitatif yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

Untuk menjawab permasalahan nomor satu yaitu apakah pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman cukup untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu:

1. Mencari data-data yang diperlukan yaitu data pendapatan asli daerah dan data anggaran pendapatan belanja daerah.
2. Menghitung besarnya prosentase dari perbandingan pendapatan asli daerah dan APBD untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman apakah pendapatan asli daerah yang dimiliki cukup atau tidak jika dilaksanakan otonomi daerah. Teknik yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data horisontal yaitu analisis data dengan mengadakan perbandingan pendapatan asli daerah dari tahun anggaran 1996-2000. Setelah dilakukan perbandingan maka akan diketahui perkembangan prosentase yang terjadi dari pendapatan asli daerah. Analisis data akan ditunjukkan dalam:

1. Data absolut atau data dalam jumlah rupiah

Data ini diperoleh dari selisih rupiah tiap tahun, dari tahun anggaran yang diperbandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

2. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase

Data ini diperoleh dengan membagi jumlah pertambahan atau penurunan dari pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan asli daerah tahun anggaran sebelumnya.

3. Menuliskan data dalam bentuk tabel

4. Setelah diketahui tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah kemudian dilakukan pengujian dengan cara membandingkan prosentase yang dihasilkan tersebut dengan 50% sumbangan pendapatan asli daerah terhadap APBD.
5. Menentukan kesimpulan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jika Kabupaten Sleman memiliki sumbangan pendapatan asli daerah sebesar 50% terhadap APBD, maka pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman cukup untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan akan dicari faktor-faktor yang mendukung tersebut, tetapi jika Kabupaten Sleman sumbangan pendapatan asli daerahnya kurang dari 50% maka tidak cukup untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan akan dievaluasi penyebab mengapa pendapatan asli daerah tidak bisa memberikan sumbangannya di atas 50%.

Untuk menjawab pertanyaan nomor dua mengenai perkembangan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman menggunakan analisis deret waktu. Dimana ada tiga sasaran pokok yang ingin dicapai dengan menggunakan analisis deret waktu yaitu: (Nugroho,dkk,1985:292)

1. Faktor-faktor apa saja yang berfungsi dimasa lalu dan telah menyebabkan perkembangan sumber pendapatan asli daerah yang sedang diselidiki itu mencapai hasil yang diperoleh pada saat analisis dilakukan
2. Faktor-faktor apa pula yang sedang berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan asli daerah.

3. Apakah dan bagaimanakah kaitan faktor-faktor dimasa lampau dan masa kini dengan hari depan pendapatan asli daerah.

Rumus yang digunakan adalah:

$Y = a + bX$ dimana,

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

$$X = 0$$

Keterangan:

Y = Variabel pendapatan asli daerah

a = Konstanta yang akan menunjukkan besarnya nilai Y

b = Variabel per X yaitu menunjukkan perubahan nilai Y dari setiap perubahan satu unit X

n = jumlah data

Setelah diketahui persamaan $Y = a + bX$ maka, dapat diketahui perkembangan sumber pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun apabila trendnya naik (dilihat dari lereng garis trend yang positif) berarti pendapatan asli daerah yang dihasilkan semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan, apabila trendnya turun berarti semakin mengalami ketidakcukupan pendapatan asli daerah dan jika tetap berarti kecukupan pendapatan asli daerah tetap dari tahun ke tahun.

BAB IV
GAMBARAN UMUM
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SLEMAN

A. GEOGRAFI

1. Geografi

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten dari empat kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman terletak di antara $107^{\circ} 15'$ Bujur Timur dan $100^{\circ} 29'$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34'$ Lintang Selatan dan $7^{\circ} 47'$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman berada pada ketinggian antara 1000-2500 meter di atas permukaan air laut. Beberapa sungai yang mengalir melalui kabupaten ini seperti Sungai Progo, Sungai Krasak, Sungai Boyong, dan Sungai Kuning.

2. Batas Wilayah

Kabupaten Sleman mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali (Propinsi Jawa Tengah)

Sebelah Timur : Kabupaten Klaten (Propinsi Jawa tengah)

Sebelah Selatan: Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta (Propinsi DIY)

Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo (Propinsi DIY), dan kabupaten Purworejo (Propinsi Jawa Tengah)

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 574 Km² dimana secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, 1212 dusun.

B. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman sampai dengan akhir tahun 2000 adalah 850 176 jiwa dengan komposisi menurut jenis kelamin pria sebanyak 420 159 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 430 071 jiwa. Dalam setiap tahunnya Kabupaten Sleman mengalami peningkatan jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat dari tahun 1996 jumlah penduduk sebanyak 809 490 jiwa, tahun 1998 jumlah penduduknya sebanyak 828 960 jiwa dan pada tahun 1999 jumlah penduduknya sebanyak 838 628 jiwa.

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2000 adalah 1479 jiwa per Km² dengan luas areal 574,82Km². Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Depok 3 069 per Km² dengan luas areal 355,55 Km². Sedangkan kecamatan yang rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Cangkringan yaitu 26,54 per Km² dengan luas arealnya 47,99 Km².

3. Angkatan Kerja



Pertambahan penduduk Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun yang selalu meningkat sudah tentu akan diikuti pula oleh peningkatan angkatan kerja dan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja dan pencari kerja pada tahun 2000 adalah:

- a. Tidak tamat SD sebanyak 17 orang
- b. Tamatan SD sebanyak 87 orang
- c. Tamatan SLTP dan yang sederajat sebanyak 900 orang
- d. Tamatan SLTA dan yang sederajat sebanyak 5 685 orang
- e. Tamatan Diploma atau akta I dan akta II sebanyak 205 orang
- f. Tamatan Sarjana muda atau DIII sebanyak 937 orang
- g. Tamatan Sajana sebanyak 2898

Sehingga total jumlah angkatan kerja dan pencari kerja di Kabupaten Sleman adalah 25 512 orang.

C. Kondisi Wilayah.

1. Kekayaan Alam

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman adalah:

a. Tanah

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Sleman adalah jenis tanah *litosol*, *regosol*, *latosol*, dan *gramusol*. Jenis tanah dapat dibedakan menjadi dua yaitu tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan tanah yang dikuasai oleh negara. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat digunakan untuk tanah pertanian, perkebunan, perikanan, pekarangan, dan

pembangunan. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh negara adalah tanah kawasan hutan yang luasnya 6 483 ha atau sekitar 11% dari seluruh luas Kabupaten Sleman. Kawasan hutan negara digunakan untuk hutan wisata seluas 178 ha, hutan lindung seluas 1 228 ha dan hutan cagar alam seluas 165 ha ada pula hutan yang dikuasai oleh rakyat seluas 4600 ha.

b. Flora dan Fauna

Jenis-jenis tumbuhan yang ada di Kabupaten Sleman adalah tanaman pangan meliputi padi, tanaman palawija, dan tanaman hortikultura. Tanaman palawija mencakup komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, serta kacang hijau. Adapun jenis hortikulturanya meliputi sayur-mayur, buah-buahan dan tanaman hias. Sedangkan jenis hewannya meliputi hewan yang ditenakkan meliputi sapi potong, sapi perah, kambing dan ternak unggas (ayam kampung, ayam petelor, dan ayam potong).

2. Nilai – nilai budaya

Agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Sleman pada umumnya adalah agama Islam, sedangkan agama yang lain adalah agama Katholik, agama Kristen, agama Budha, dan agama Hindu. Kabupaten yang merupakan bagian dari propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal dengan pusat kebudayaannya memiliki berbagai bentuk kesenian khas seperti Jatilan, Reog Campur, Badui, dan Tarian Klasik.

D. Perekonomian

Sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Sleman adalah sektor pertanian, industri, pertambangan dan galian, dan sektor pariwisata.

1. Sektor Pertanian

Masyarakat Kabupaten Sleman sebagian besar mata pencahariannya adalah dari pertanian. Luas lahan yang digunakan untuk pertanian adalah 24,291 ha. Sektor pertanian yang dilakukan di Kabupaten Sleman meliputi pertanian untuk tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan.

2. Sektor industri

Usaha industri yang dilakukan dipisahkan menjadi sektor industri rumah tangga, sektor industri kecil, sektor industri sedang, dan sektor industri besar. Industri merupakan salah satu sektor yang turut mendukung dan menopang perekonomian. Industri rumah tangga adalah industri yang dilakukan oleh keluarga dengan jumlah tenaganya kurang dari 10 orang. Industri sedang adalah industri dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang, dan industri besar adalah industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Jumlah industri besar yang ada sebanyak 157 buah, industri menengah 437 buah, industri perorangan 2 743 buah, dan usaha perorangan sebanyak 2 500 buah. Jenis industri yang paling banyak adalah industri kerajinan seperti kerajinan kulit, kerajinan dari kayu, kerajinan dari tanah liat, kerajinan dari batu dan kerajinan dari bambu. Selain kerajinan ada juga industri tekstil.

3. Pertambangan dan Galian

Banyaknya usaha pertambangan dan galian di Kabupaten Sleman yang berjumlah 378 buah. Jenis pertambangan dan galian yang berpotensi untuk diusahakan termasuk dalam golongan bahan tambang galian C, seperti:

- a. Batu di daerah Cangkringan dan Tempel
- b. Pasir di daerah Cangkringan, Tempel, dan Kalasan
- c. Tanah Liat di daerah Godean, Prambanan, Tempel, dan Seyegan
- d. Batu Kapur di daerah Prambanan.
- e. Sirtu di daerah Ngemplak dan Ngaglik.

4. Pariwisata

Kabupaten Sleman yang merupakan bagian kota budaya dan pariwisata memiliki beberapa obyek wisata. Obyek wisata yang ada dibedakan menjadi dua yaitu wisata budaya dan wisata alam. Obyek wisata alam yang ada seperti hutan taman Plawangan, obyek wisata Kali Adem, dan obyek wisata Kali Kuning. Sedangkan yang termasuk obyek wisata budaya adalah Museum Dirgantara Mandala, Monumen Yogya Kembali, Museum Affandi dan Candi Prambanan.

5. Sarana Perhubungan

Salah satu sarana perhubungan adalah jalan. Jenis jalan yang ada adalah jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Panjang jalan propinsi sepanjang 139,69 km, panjang jalan kabupaten sepanjang 1 085,13 km dan jalan desa sepanjang 2 764,13 km.

E. Pemerintahan

Kabupaten Sleman dikepalai oleh seorang Bupati. Selain itu ada pula instansi pemerintahan yang berjumlah 34 instansi otonom dan 9 instansi vertikal. Yang termasuk dalam instansi vertikal adalah Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri, Kandep Penerangan, Kandep Agama, Inspeksi Dik Bud dan Guru, Badan Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana. Adapun kecamatan yang ada di kabupaten sebanyak 17 buah yaitu Kecamatan Moyudan, Minggir, Seyegan, Godean, Gamping, Mlati, Depok, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan.

BAB V

PEMBAHASAN

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan *desentralisasi* adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah lain, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah sendiri mencakup hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan dari penerimaan terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum. Yang dimaksudkan dengan bagian dari pengelolaan sumber daya alam antara lain dari bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, kehutanan dan perikanan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

A. Perbandingan PAD dengan APBD

Untuk mengetahui cukup atau tidaknya sumbangan PAD terhadap APBD maka dapat dilihat dalam tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Perbandingan PAD dengan APBD antara Anggaran dan Realisasi
Tahun anggaran 1996/1997-Desember 2000

Tahun Anggaran	Anggaran			Realisasi		
	PAD Total (Rp)	APBD (Rp)	Proporsi PAD dalam APBD (%)	PAD Total (Rp)	APBD (Rp)	Proporsi PAD dalam APBD (%)
1996/1997	11 444 822 219,33	72 221 752 212,44	15,8	10 574 223 660,34	72 061 104 085,85	15
1997/1998	14 825 140 000,00	85 535 920 023,56	17	13 464 881 289,90	90 241 670 203,13	15
1998/1999	14 414 507 991,00	95 805 613 560,47	15	14 786 415 038,00	96 078 447 422,55	15,4
1999/2000	15 872 509 028,51	126 352 419 748,51	13	12 465 323 344,84	28 137 559 870,93	44,3
Des 2000	15 829 886 951,00	127 853 274 244,00	12,9	18 788 157 746,01	118 121 253 427,29	16

Sumber: DIPENDA Kabupaten Sleman; diolah penulis

Dengan melihat tabel di atas dapat terlihat bagaimana proporsi pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya.

Pada tahun 1996/1997 proporsi pendapatan asli daerah dianggarkan 15,8% dan dalam realisasi sebesar 15%. Hal ini disebabkan karena dalam realisasi jumlah APBD lebih kecil dari anggarannya dan juga jumlah penerimaan PAD jumlahnya lebih kecil dari anggarannya yaitu Rp. 11 444 822 219 sedangkan realisasinya Rp. 10 574 233 660. Penurunan proporsi PAD disebabkan karena penerimaan sektor pajak dan dari sektor retribusi menurun. Dengan melihat proporsi PAD pada tahun 1996/1997 kebutuhan dana di Kabupaten Sleman jika dilaksanakan otonomi daerah belum mencukupi karena proporsi PAD kurang dari 50 % dalam APBD.

Pada tahun 1997/1998 di anggarakan proporsi PAD naik menjadi 17% tetapi dalam realisasinya sebesar 15%. Hal ini disebabkan jumlah penerimaan PAD lebih kecil dan jumlah penerimaan APBD yang lebih besar dari anggarannya. Faktor penyebabnya adalah besarnya sumbangan untuk subsidi perimbangan keuangan negara, subsidi DATI II percontohan, dan tunjangan kurang penghasilan bagi aparat desa.

Pada tahun anggaran 1998/1999 ditetapkan proporsi anggaran PAD dalam APBD 15% berdasarkan dari evaluasi tahun anggaran sebelumnya tetapi dalam realisasi naik menjadi 15,4%. Hal ini disebabkan karena dari sisi APBD dalam realisasi lebih besar dari anggarannya tetapi diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan PAD. Walaupun ada kenaikan tetapi

proporsi PAD dalam APBD jika dilaksanakan otonomi daerah belum mencukupi kebutuhan dana daerahnya.

Pada tahun anggaran 1999/2000 proporsi PAD dianggarkan lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 13%. Dalam realisasi proporsi PAD dalam APBD jauh lebih besar mencapai 44,3%. Hal ini disebabkan karena dari sisi APBD dalam realisasi tidak memberikan subsidi belanja pegawai selain itu juga berkurangnya subsidi belanja non pegawai dan bantuan pembangunan daerah. Meskipun jumlah proporsi PAD pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup drastis tetapi belum mencukupi karena belum mencapai di atas 50% proporsi PAD dalam APBD.

Peningkatan proporsi PAD yang cukup bagus pada tahun 1999/2000 tidak dapat terlaksana terus. Sampai dengan akhir tahun 2000, meskipun PAD total dianggarkan 12,9% dan dalam realisasi mengalami peningkatan tetapi tidak cukup banyak yaitu 16%. Penyebabnya adalah dari penerimaan PAD sendiri sudah melebihi anggaran tetapi dari sisi APBD meskipun dalam realisasi mengalami penurunan tetapi pada tahun ini pemerintah memberikan kembali subsidi kepada pegawai otonom yang mencapai Rp. 67 823 582 432 dan meningkatnya subsidi belanja non pegawai.

Dengan melihat perkembangan PAD dan APBD sampai dengan akhir tahun 2000 Kabupaten Sleman belum mencukupi kebutuhannya, meskipun pada tahun 1999/2000 baru pertama kalinya mengalami peningkatan yang cukup banyak dan hampir mencukupi kebutuhan daerah. Dengan melihat

perkembangan selama ini kontribusi PAD total rata-rata 12,9%-16% sulit untuk dilaksanakan otonomi daerah jika mengandalkan dari sektor PAD.

B. Perkembangan PAD dari tahun 1996/1997- Desember 2000

1. Perkembangan Anggaran dan Realisasi PAD Total Tahun 1996/1997- Desember 2000

Untuk mengetahui perkembangan PAD total tahun 1996/1997- Desember 2000 dapat dilihat dalam tabel 5.2 pada halaman berikut:

Tabel 5.2
Perkembangan PAD Total
Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan		Realisasi (Rp)	Pertumbuhan	
		Δ Anggaran (Rp)	%		Δ Realisasi (Rp)	%
1996/1997	11 444 822 219,33	3 380 317 790	29,50	10 574 223 660,34	2 890 675 620,00	27,34
1997/1998	14 825 140 000,00	- 410 632 010	-2,76	13 464 881 289,90	1 321 533 750,90	9,81
1998/1999	14 414 507 991,00	1 458 001 037	10,11	14 786 415 038,00	-2 321 091 690,84	-15,70
1999/2000	15 872 509 028,51	- 42 622 070	-2,70	12 465 323 344,84	6 322 834 000,83	50,72
Des 2000	15 829 886 951,00			18 788 157 746,01		

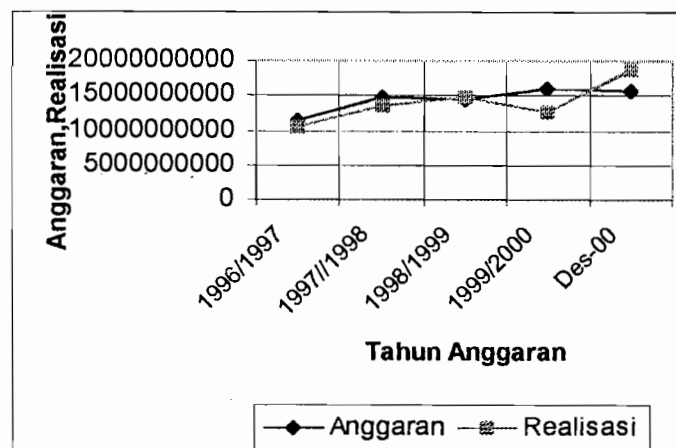
Sumber: DIPENDA Kabupaten Sleman; diolah penulis

Secara umum perkembangan PAD total dapat dilihat dalam grafik 5.1 berikut ini:

Grafik 5.1

Perkembangan PAD Total

Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000



Melihat tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan asli daerah secara total dari tahun ke tahun mengalami perubahan dalam realisasi yaitu pada tahun 1998/1999 dan pada Desember 2000 mengalami peningkatan dalam prosentase.

2. Perkembangan Pajak Daerah Tahun 1996/1997- Desember 2000

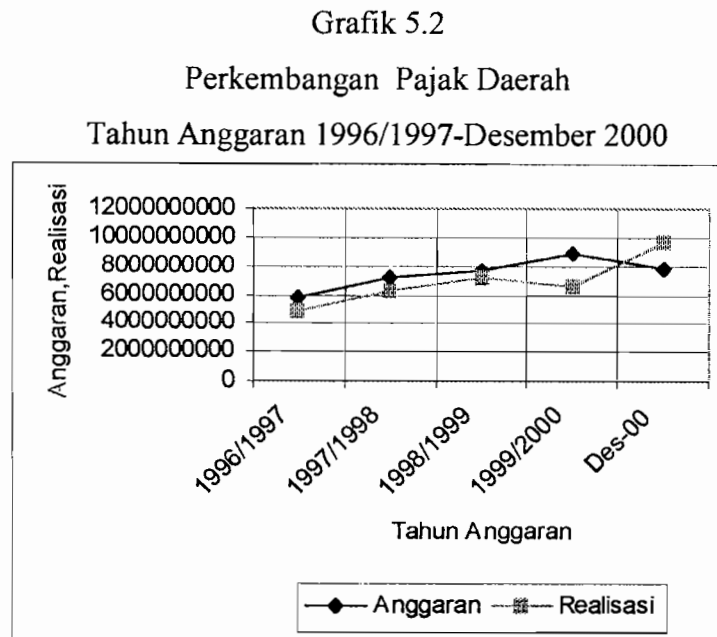
Untuk mengetahui perkembangan anggaran dan realisasi dari pajak daerah dapat dilihat dalam tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3
Perkembangan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan		Realisasi (Rp)	Pertumbuhan	
		Δ Anggaran (Rp)	%		Δ Realisasi (Rp)	%
1996/1997	5 802 800 000,00	132 180 000,00	22,77	4 904 287 863,05	1 402 777 121,77	28,6
1997/1998	7 124 600 000,00	543 261 469,50	7,63	6 307 064 984,82	922 117 724,05	14,6
1998/1999	7 667 861 469,00	1 143 771 864,50	15	7 229 182 708,87	- 701 675 376,21	-9,7
1999/2000	8 811 633 333,00	-1 065 609 425,00	-12	6 527 507 332,66	3 074 507 455,03	47,10
Des 2000	7 746 023 908,00			9 602 014 787,69		

Sumber: DIPENDA Kabupaten Sleman; diolah penulis

Untuk lebih jelasnya perubahan kenaikan maupun penurunan anggaran dan realisasi dari penerimaan sektor pajak daerah dapat dilihat dalam grafik 5.2 berikut:



Dengan melihat tabel dan grafik di atas dapat dilihat perkembangan pajak daerah dari tahun 1996/1997–Desember 2000 mengalami peningkatan dan penurunan dalam prosentase.

Pada tahun 1996/1997 terealisasi sebesar 28,6 %. Hal ini disebabkan jumlah penerimaan pembangunan I dan juga pajak penerangan jalan tarifnya relatif masih rendah.

Pada tahun anggaran 1997/1998 prosentase realisasi meningkat dibandingkan dengan anggarannya yaitu 28,6 %. Walaupun jumlah prosentase meningkat tetapi belum dapat mencukupi anggarannya. Hal ini disebabkan karena semakin berkurangnya penerimaan pajak pembangunan

I dimana para wajib pajak tidak tepat waktu membayar pajak dilihat dari besarnya jumlah denda pajak yang diterima yaitu Rp 1 007 524,94.

Pada tahun 1998/1999 dalam prosentase perkembangan PAD menurun dari pada tahun sebelumnya yaitu 14,6% dan masih kurang mencukupi kebutuhan daerah. Hal ini disebabkan adanya pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan, pajak galian dan olahan golongan C yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak menjadi pos penerimaan tetapi dianggarkan cukup banyak yaitu Rp 709 662 918,50 dan terealisasi Rp 450 728 092,00.

Selain itu pada tahun 1999/2000 mulai berlaku undang-undang No.18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi dimana dalam undang-undang tersebut pos yang tidak menguntungkan diganti/dihapus dengan yang lebih menguntungkan. Keadaan ini menyebabkan realisasi pajak tahun ini berkurang hingga -9,7 %.

Pada akhir tahun 2000 penerimaan dari pajak meningkat mencapai 47,10%. Hal ini disebabkan adanya pos yang menguntungkan yaitu pajak hotel dan restoran mencapai 129,2%, pajak hiburan 167,08%.

3. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Tahun 1996/1997- Desember 2000

Untuk lebih jelasnya perkembangan anggaran dan realisasi penerimaan retribusi dapat dilihat dalam tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Perkembangan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan		Realisasi (Rp)	Pertumbuhan	
		Δ Anggaran (Rp)	%		Δ Realisasi (Rp)	%
1996/1997	2 734 260 000,00			2 523 970 420,00		
1997/1998	3 843 690 000,00	1 109 430 000	40,60	3 450 573 395,00	926 602 975,00	36,71
1998/1999	3 407 050 940,00	- 4 366 390 060	-11,36	3 466 829 646,00	16 256 251,00	0,47
1999/2000	5 407 701 800,00	2 000 650 860	58,70	4 207 440 692,50	740 611 146,50	21,40
Des 2000	5 631 150 300,00	233 403 500	4,13	5 676 781 484,60	1 469 340 797,10	35,00

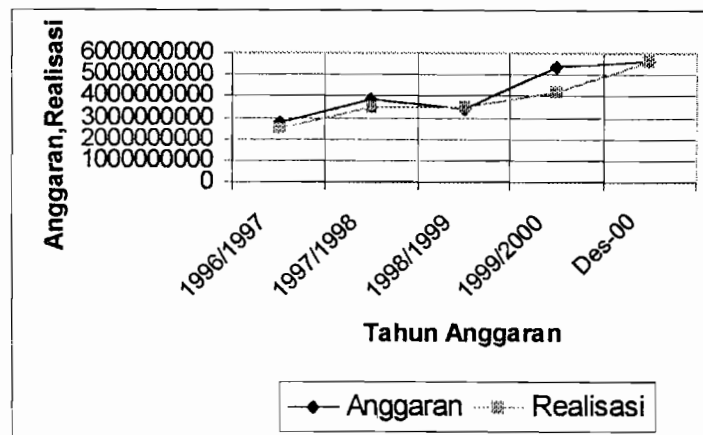
Sumber: DIPENDA Kabupaten Sleman; diolah penulis

Secara grafik perkembangan penerimaan sektor retribusi daerah dapat dilihat dalam grafik 5.3 berikut:

Grafik 5.3

Perkembangan Retribusi Daerah

Tahun anggaran 1996/1997-Desember 2000



Dari tabel dan grafik tersebut di atas penerimaan pemerintah dari sektor retribusi setiap tahunnya mengalami perubahan naik atau turun dalam prosentase.

Pada tahun 1997/1998 prosentase penerimaan retribusi dalam realisasi menurun yaitu 36,71% dari anggarannya sebesar 40,6%. Penyebab penurunan ini adalah menurunnya jumlah pemasang reklame. Selain itu dari retribusi ijin bangunan hanya memberikan sumbangannya sebesar Rp. 391 696 010,00 jauh dari anggarannya Rp. 600 000 000,00. Pada saat itu keadaan negara tidak stabil diwarnai pembakaran gedung-gedung yang mengakibatkan orang menunda pembangunan.

Pada tahun 1998/1999 anggarannya anggarannya semakin menurun yaitu -11,76% dan dalam realisasi 0,47%. Hal ini disebabkan penerimaan

retribusi pengujian kendaraan bermotor menurun dan juga dari berkurangnya penerimaan bea parkir.

Pada tahun 1999/2000 penerimaan retribusi jauh dari anggarannya karena krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan jumlah izin mendirikan bangunan semakin berkurang dimana harga material melambung tinggi. Dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir juga mengalami penurunan karena banyak tukang parkir liar yang tidak menyetorkan uang parkir.

Pada akhir tahun 2000 penerimaan retribusi mengalami peningkatan dalam realisasinya yaitu 35% dimana anggarannya 4,13%. Penyebabnya adalah jumlah izin mendirikan bangunan mulai bertambah karena semakin mendesak kebutuhan dan penyebab kenaikan ini juga karena tarif parkir dinaikkan yang menambah jumlah pemasukkan retribusi parkir.

4. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Bagian Laba BUMD Tahun 1996/1997-Desember 2000

Untuk melihat perkembangan penerimaan daerah dari sektor bagian laba BUMD terlihat dalam tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5
Perkembangan Pembagian Laba BUMD
Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan		Realisasi (Rp)	Pertumbuhan	
		Δ Anggaran (Rp)	%		Δ Realisasi (Rp)	%
1996/1997	442 884 579,33			570 968 969,33		
1997/1998	673 000 000,00	230 115 426,67	52,00	708 029 761,57	137 066 792,22	24,00
1998/1999	880 999 000,00	207 999 000,00	31,00	883 219 551,51	175 189 790,06	25,00
1999/2000	873 122 161,51	-7 876 838,59	-9,00	603 790 632,33	-279 428 919,18	31,64
Des 2000	1 262 000 000,00	388 877 838,44	44,50	1 242 452 958,17	638 662 325,16	105,77

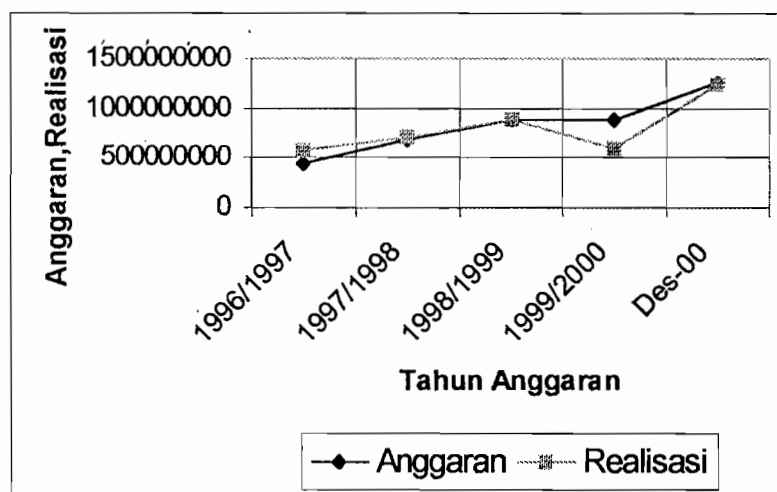
Sumber: DIPENDA Kabupaten Sleman; diolah penulis

Secara grafik perkembangan penerimaan laba dari BUMD dapat dilihat dalam grafik 5.4 berikut ini:

Grafik 5.4

Perkembangan Bagian Laba BUMD

Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000



Dengan melihat tabel dan grafik di atas penerimaan dari bagian laba BUMD dari tahun 1996/1997 sampai dengan akhir Desember 2000 mengalami penurunan dalam prosentase.

Pada tahun 1997/1998 dalam perkembangannya sektor bagian laba BUMD menurun walaupun tidak terlalu banyak yaitu sebesar 24%. Penyebabnya adalah jumlah nasabah PD Bank Pasar relatif stabil dengan jumlah pinjaman.

Pada tahun 1998/1999 realisasi mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya. Tetapi perkembangan dalam tahun anggaran 1998/1999 mengalami penurunan dimana dalam anggarannya 31% ternyata dalam realisasi sebesar 25%. Hal ini disebabkan dari PD bank

Pasar anggaran tidak bisa terealisasi 100% karena pada saat itu awal dari krisis ekonomi sehingga nasabah mengurangi jumlah pinjaman.

Pada tahun 1999/2000 penerimaan dari bagian laba BUMD semakin menurun hingga -9% dan realisasinya 31,04% hal ini disebabkan karena dari PDAM tidak dapat terealisasi sama sekali karena pada saat itu PDAM mengalami devisa untuk biaya operasionalisasi sehingga tidak bisa memberikan bagian labanya kepada pemerintah.

Pada akhir tahun 2000 bagian laba BUMD mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga mencapai 105,77% dimana pada tahun-tahun sebelumnya perkembangannya mengalami penurunan. Faktor penyebab kenaikan pada tahun ini karena meningkatnya sumbangan laba dari BPR dan dari PD Bank Pasar.

5. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Penerimaan dari Dinas Tahun 1996/1997-1998/1999

Untuk mengetahui perkembangan anggaran dan realisasi dari penerimaan dinas dapat dilihat dalam tabel 5.6 berikut:

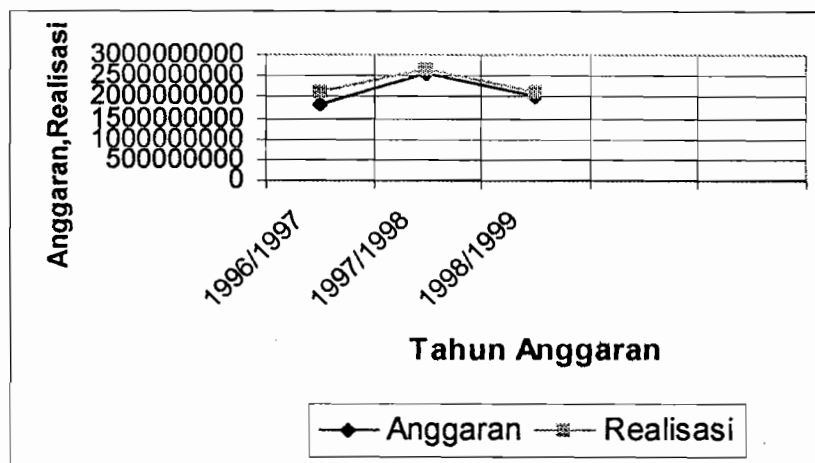
Tabel 5.6
Perkembangan Penerimaan Dinas
Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan		Realisasi (Rp)	Pertumbuhan	
		Δ Anggaran (Rp)	%		Δ Realisasi (Rp)	%
1996/1997	1 819 143 640,00			2 099 323 521,79		
1997/1998	2 577 850 000,00	758 706 360,00	41,70	2 671 416 398,79	572 092 877,00	27,30
1998/1999	2 036 323 581,50	541 526 419,50	-25,00	2 136 076 766,55	- 535 339 632,24	-20,00

Sumber: DIPENDA Kabupaten Sleman; diolah penulis

Secara grafik perkembangan anggaran dan realisasi penerimaan dari dinas dapat dilihat dalam garfik 5.5 berikut ini:

Grafik 5.5
Perkembangan Penerimaan Dari Dinas
Tahun anggaran 1996/1997-1998/1999



Dengan melihat tabel dan grafik di atas penerimaan dari pos dinas realisasinya selalu melebihi dari anggarannya. Pada tahun 1997/1998 realisasi anggaran sebesar 27,3% dimana anggarannya mencapai 41,7 %. Hal ini disebabkan karena menurunnya penerimaan dari DPU, dinas cipta karya, dinas perikanan, dan dari dinas perkebunan.

Pada tahun 1998/1999 perkembangan dari penerimaan dinas menurun dalam prosentase yaitu -20%. Hal ini disebabkan karena dari dinas pekerjaan umum jumlah penerimaan mengalami penurunan dari yang dianggarkan Rp 53 000 000,00 dan dalam realisasi Rp 51 580 100,00

6. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Tahun 1996/1997-Desember 2000

Untuk mengetahui perkembangan anggaran dan realisasi penerimaan lain-lain dapat dilihat dalam tabel 5.7 pada halaman berikut ini:

Tabel 5.7
Perkembangan Penerimaan Lain-lain
Tahun Anggaran 1996/1997-Desember 2000

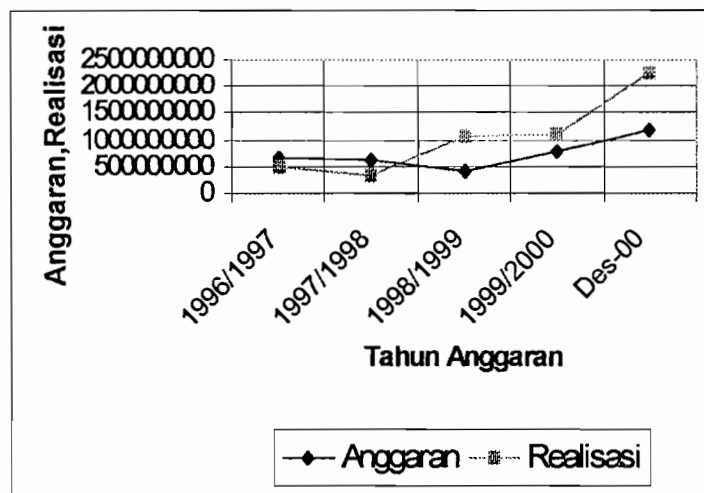
Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan		Realisasi (Rp)	Pertumbuhan	
		Δ Anggaran (Rp)	%		Δ Realisasi (Rp)	%
1996/1997	645 734 000,00			475 672 886,17		
1997/1998	606 000 000,00	39 734 000,00	- 6,15	327 796 749,72	- 147 876 136,55	-31,00
1998/1999	422 273 000,00	183 727 000,00	- 30,32	1 071 106 365,07	743 309 615,65	227,00
1999/2000	780 051 734,00	357 778 734,00	85,00	1 126 584 678,35	55 478 313,28	5,18
Des 2000	1 190 757 743,00	410 706 009,00	53,00	2 266 908 515,55	1 140 323 837,20	101,30

Sumber: DIPENDA Kabupaten Sleman; diolah penulis



Untuk lebih jelasnya secara grafik perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan dari penerimaan lain-lain dapat dilihat dalam grafik 5.6 berikut:

Grafik 5.6
Perkembangan Penerimaan Lain-lain
Tahun Anggaran 1996/1997- Desember 2000



Dengan melihat dari tabel di atas penerimaan dari pos pendapatan lain-lain setiap tahun realisasinya mengalami peningkatan maupun penurunan.

Pada tahun 1997/1998 perkembangan pendapatan lain-lain terealisasi -31% dari anggarannya yaitu Rp 327 796 749,72. Penyebab penurunan ini karena tidak ada penjualan hasil milik daerah.

Pada tahun 1998/1999 penerimaan lain-lain mengalami peningkatan yang cukup banyak mencapai 227%. Hal ini disebabkan karena banyaknya sumbangan dari pihak ketiga dan juga dari pemakaian jasa giro bank.

Pada tahun 1999/2000 dalam realisasinya turun hingga 5,18% jauh dari anggarannya yang mencapai 85%. Faktor penyebabnya adalah adanya anggaran penjualan dokumen lelang tetapi sampai dengan tahun anggaran berakhir tidak dapat terealisasi dimana pada tahun ini tidak ada penjualan lelang dokumen yang dianggarkan Rp 4 500 000, selain itu juga berkurangnya penjualan kekayaan milik daerah.

Pada akhir tahun 2000 penerimaan lain-lain mengalami peningkatan dalam prosentase yaitu 101,3%. Hal ini disebabkan karena besarnya pemakaian jasa giro dan adanya kelebihan setoran dari pembayaran yang tidak dianggarkan sebelumnya.

C. Prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat perbedaan antara anggaran dengan realisasi pendapatan asli daerah. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah mekanisme perencanaan anggaran dimana pemerintah daerah dalam menentukan penerimaan pendapatan asli daerah berdasarkan evaluasi dari penerimaan tahun sebelumnya. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yaitu berlakunya undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang menyebabkan jumlah pos-pos pajak dan retribusi berkurang.

Dengan melihat prediksi yang dibuat oleh pemerintah daerah penulis mencoba menentukan prediksi atau perkiraan penerimaan pendapatan asli daerah dengan menggunakan metode trend.

Untuk prediksi atau perkiraan pendapatan asli daerah dibagi menjadi lima sektor yaitu memprediksi pajak daerah, memprediksi retribusi daerah, memprediksi laba dari laba BUMD, memprediksi penerimaan lain-lain. Untuk mencari prediksi digunakan metode garis lurus dengan persamaan $Y = a + b X$. Untuk lebih jelasnya prediksi-prediksi tersebut adalah:

1. Prediksi penerimaan Pajak Daerah untuk tahun 2001-2010

Untuk mencari persamaan $Y = a + b X$ digunakan tabel 5.8 berikut ini:

Tabel 5.8

Perhitungan Trend Pajak Daerah

Th. Anggaran	X	Y	XY	X ²
1996/1997	-2	4 904 287 863	-9 808 575 726	4
1997/1998	-1	6 307 064 984	-6 307 064 984	1
1998/1999	0	7 229 182 708	0	0
1999/2000	1	6 527 507 332	6 257 507 332	1
2000	2	9 602 014 787	19 204 029 570	4
Jumlah	0	34 570 057 670	28 792 162 948	10

Dari tabel di atas kemudian dicari persamaan $Y = a + b X$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

$$X = 0$$

$$a = \frac{34\,570\,057\,670}{5}$$

$$= 6\,914\,011\,535$$

$$b = \frac{28\,792\,162\,948}{10}$$

Setelah nilai a dan b diketahui kemudian dibuat persamaan yaitu:

$$Y = 6\,914\,011\,535 + 2\,879\,216\,294,8 (X)$$

Dari persamaan tersebut dibuat prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2001-2010 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2001, } Y &= \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 2\,879\,216\,294,8 (3) \\ &= \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 8\,637\,648\,884,4 \\ &= \text{Rp } 15\,551\,660\,419,4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2002, } Y &= \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 2\,879\,216\,294,8 (4) \\ &= \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 11\,516\,865\,879,2 \\ &= \text{Rp } 18\,430\,876\,714,2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2003, } Y &= \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 2\,879\,216\,294,8 (5) \\ &= \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 14\,396\,081\,474 \\ &= \text{Rp } 21\,310\,093\,303,8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2004, } Y &= \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 2\,879\,216\,294,8 (6) \\ &= \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 17\,275\,297\,768,8 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 24\,189\,309\,303,8$$

$$\text{Tahun 2005, } Y = \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 2\,879\,216\,294,8 \text{ (7)}$$

$$= \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 20\,154\,514\,063,6$$

$$= \text{Rp } 27\,068\,525\,598,6$$

$$\text{Tahun 2006, } Y = \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 2\,879\,216\,294,8 \text{ (8)}$$

$$= \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 23\,033\,730\,358,44$$

$$= \text{Rp } 29\,947\,741\,898,44$$

$$\text{Tahun 2007, } Y = \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 2\,879\,216\,294,8 \text{ (9)}$$

$$= \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 25\,912\,946\,653,2$$

$$= \text{Rp } 32\,826\,957\,188,2$$

$$\text{Tahun 2008, } Y = \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 2\,879\,216\,294,8 \text{ (10)}$$

$$= \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 28\,792\,162\,948$$

$$= \text{Rp } 35\,706\,174\,483$$

$$\text{Tahun 2009, } Y = \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 2\,879\,216\,294,8 \text{ (11)}$$

$$= \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 31\,671\,379\,242,8$$

$$= \text{Rp } 38\,585\,290\,777,8$$

$$\text{Tahun 2010, } Y = \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 2\,879\,216\,294,8 \text{ (12)}$$

$$= \text{Rp } 6\,914\,011\,535 + \text{Rp } 34\,550\,595\,537,6$$

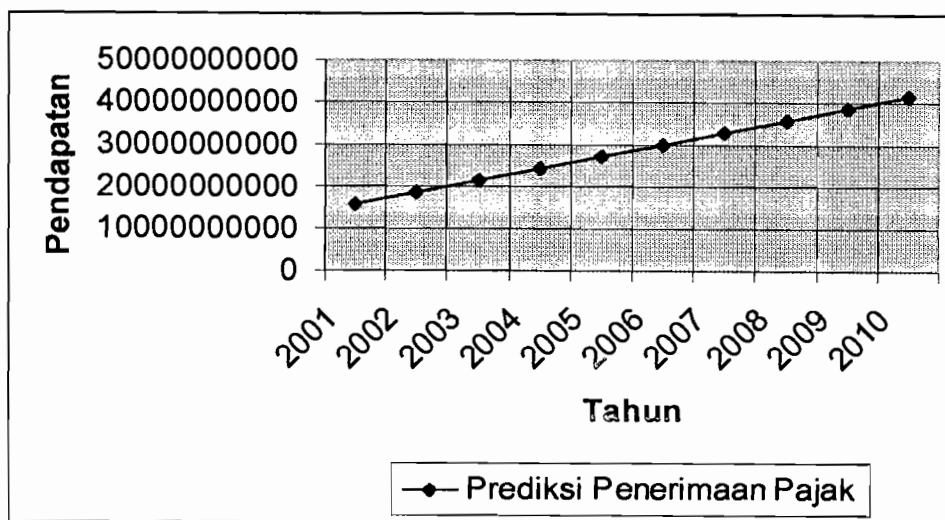
$$= \text{Rp } 41\,464\,007\,072,6$$

Setelah prediksi pajak daerah untuk tahun anggaran 2001-2010 diketahui kemudian dibuat penerapan garis trend yang dapat dilihat pada grafik 5.7 berikut:

Grafik 5.7

Prediksi Pajak Daerah

Tahun Anggaran 2001-2010



2. **Prediksi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi untuk tahun 2001-2010.**

Untuk mencari nilai dari persamaan $Y = a + b X$ digunakan tabel 5.9 berikut:

Tabel 5.9

Perhitungan Trend Pendapatan Retribusi

Th. Anggaran	X	Y	XY	X ²
1996/1997	-2	2 523 970 420,00	-5 047 941 480,00	4
1997/1998	-1	3 450 573 395,00	3 450 573 395,00	1
1998/1999	0	3 466 829 646,06	0	0
1999/2000	1	4 207 440 692,50	4 207 440 692,50	1
2000	2	5 676 781 484,60	11 535 562 969,20	4
Jumlah	0	1 932 559 638,16	7 062 488 786,70	10

Dari tabel tersebut di atas kemudian dicari nilai persamaan $Y = a + b X$

$$\begin{aligned} a &= \frac{\Sigma Y}{n} \\ &= \frac{Rp19325595638,18}{5} \\ &= Rp3865119127,63 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \frac{\Sigma XY}{X^2} \\ b &= \frac{Rp7062488786,7}{10} \\ &= Rp706248878,67 \end{aligned}$$

Setelah diketahui nilai a dan b , kemudian dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = Rp 3 865 119 127,63 + Rp 706 248 878,67(X)$$

Dari persamaan tersebut kemudian dibuat prediksi untuk tahun anggaran 2001-2010

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2001, } Y &= Rp 3 865 119 127,63 + Rp 706 248 878,67 (3) \\ &= Rp 3 865 119 127,63 + Rp 2118746636,01 \\ &= Rp 5 983 865 763,64 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2002, } Y &= Rp 3 865 119 127,63 + Rp 706 248 878,67 (4) \\ &= Rp 3 865 119 127,63 + Rp 2 824 995 514,68 \\ &= Rp 6 690 114 642,83 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2003, } Y &= Rp 3 865 119 127,63 + Rp 706 248 878,67 (5) \\ &= Rp 3 865 119 127,63 + Rp 3 531 244 394 \\ &= Rp 7 396 363 521,63 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2004, } Y &= Rp 3 865 119 127,63 + Rp 706 248 878,67 (6) \\ &= Rp 3 865 119 127,63 + Rp 4 237 493 272,8 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 8\,102\,612\,400,43$$

$$\text{Tahun 2005, } Y = \text{Rp } 3\,865\,119\,127,63 + \text{Rp } 706\,248\,878,67 (7)$$

$$= \text{Rp } 3\,865\,119\,127,63 + \text{Rp } 4\,943\,742\,151,6$$

$$= \text{Rp } 8\,808\,861\,279,23$$

$$\text{Tahun 2006, } Y = \text{Rp } 3\,865\,119\,127,63 + \text{Rp } 706\,248\,878,67 (8)$$

$$= \text{Rp } 3\,865\,119\,127,63 + \text{Rp } 564\,999\,1029,56$$

$$= \text{Rp } 9\,515\,110\,159,19$$

$$\text{Tahun 2007, } Y = \text{Rp } 3\,865\,119\,127,63 + \text{Rp } 706\,248\,878,67 (9)$$

$$= \text{Rp } 3\,865\,119\,127,63 + \text{Rp } 635\,623\,990,03$$

$$= \text{Rp } 10\,221\,359\,039,66$$

$$\text{Tahun 2008, } Y = \text{Rp } 3\,865\,119\,127,63 + \text{Rp } 706\,248\,878,67 (10)$$

$$= \text{Rp } 3\,865\,119\,127,63 + \text{Rp } 7\,062\,488\,786,70$$

$$= \text{Rp } 10\,927\,607\,914,33$$

$$\text{Tahun 2009, } Y = \text{Rp } 3\,865\,119\,127,63 + \text{Rp } 706\,248\,878,67 (11)$$

$$= \text{Rp } 3\,865\,119\,127,63 + \text{Rp } 7\,768\,737\,665,37$$

$$= \text{Rp } 11\,633\,856\,794,00$$

$$\text{Tahun 2010, } Y = \text{Rp } 3\,865\,119\,127,63 + \text{Rp } 706\,248\,878,67 (12)$$

$$= \text{Rp } 3\,865\,119\,127,63 + \text{Rp } 8\,474\,986\,544,04$$

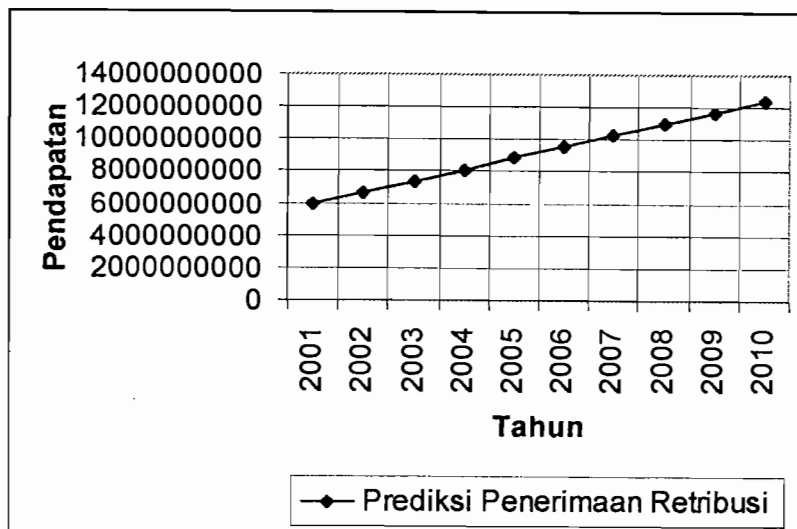
$$= \text{Rp } 12\,340\,105\,674,67$$

Setelah prediksi pendapatan retribusi daerah pada tahun 2001-2010 diketahui, kemudian dibuat garis penerapan dalam trend yang ditunjukkan dalam grafik 5.8 berikut ini:

Grafik 5.8

Prediksi Penerimaan Retribusi

Tahun Anggaran 2001-2010



3. Prediksi Penerimaan Laba BUMD Tahun 2001-2010

Untuk mencari nilai a dan b dari persamaan $Y = a + bX$ digunakan tabel 5.10

berikut ini :

Tabel 5.10

Perhitungan Trend Pendapatan Laba BUMD

Th. Anggaran	X	Y	XY	X ²
1996/1997	-2	570 968 969,33	-1 141 937 938,66	4
1997/1998	-1	708 029 761,51	-708 029 761,66	1
1998/1999	0	883 219 551,51	0	0
1999/2000	1	603 790 632,33	603 790 632,33	1
2000	2	1 242 552 958,17	2 484 905 916,34	4
Jumlah	0	4 008 461 872,91	1 238 728 848,44	10

Dari tabel di atas kemudian di cari persamaan $Y = a + b X$

$$\begin{aligned} a &= \frac{\Sigma Y}{n} \\ &= \frac{Rp4008461872,91}{5} \\ &= Rp801692374,6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \frac{\Sigma XY}{X^2} \\ &= \frac{Rp1238728848,44}{10} \\ &= Rp123872884,84 \end{aligned}$$

Setelah nilai a dan b di ketahui kemudian dibuat persamaan yaitu

$$Y = Rp 801 692 374,6 + Rp 123 872 884,84 X$$

Dari persamaan tersebut diatas kemudian dibuat prediksi pendapatan laba dari BUMD untuk tahun 2001-2010.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2001, } Y &= Rp 801 692 374,6 + Rp 123 872 884,84 (3) \\ &= Rp 801 692 374,6 + Rp 371 618 654,52 \\ &= Rp 1 173 311 029,12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2002, } Y &= Rp 801 692 374,6 + Rp 123 872 884,84 (4) \\ &= Rp 801 692 374,6 + Rp 495 491 539,36 \\ &= Rp 1 297 183 913,96 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2003, } Y &= Rp 801 692 374,6 + Rp 123 872 884,84 (5) \\ &= Rp 801 692 374,6 + Rp 619 364 424 \\ &= Rp1 421 056 798,8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2004, } Y &= \text{Rp } 801\,692\,374,6 + \text{Rp } 123\,872\,884,84 \text{ (6)} \\ &= \text{Rp } 801\,692\,374,6 + \text{Rp } 743\,237\,309,04 \\ &= \text{Rp } 1\,544\,929\,683,64\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2005, } Y &= \text{Rp } 801\,692\,374,6 + \text{Rp } 123\,872\,884,84 \text{ (7)} \\ &= \text{Rp } 801\,692\,374,6 + \text{Rp } 867\,110\,193,88 \\ &= \text{Rp } 1\,668\,802\,568,48\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2006, } Y &= \text{Rp } 801\,692\,374,6 + \text{Rp } 123\,872\,884,84 \text{ (8)} \\ &= \text{Rp } 801\,692\,374,6 + \text{Rp } 990\,983\,078,72 \\ &= \text{Rp } 1\,792\,675\,453\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2007, } Y &= \text{Rp } 801\,692\,374,6 + \text{Rp } 123\,872\,884,84 \text{ (9)} \\ &= \text{Rp } 801\,692\,374,6 + \text{Rp } 1\,114\,855\,963,56 \\ &= \text{Rp } 1\,916\,548\,339,16\end{aligned}$$

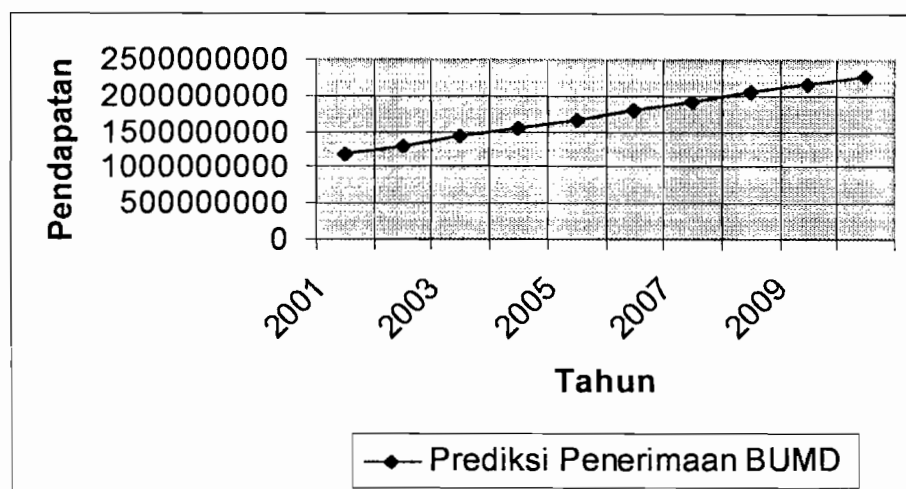
$$\begin{aligned}\text{Tahun 2008, } Y &= \text{Rp } 801\,692\,374,6 + \text{Rp } 123\,872\,884,84 \text{ (10)} \\ &= \text{Rp } 801\,692\,374,6 + \text{Rp } 1\,238\,728\,848,40 \\ &= \text{Rp } 2\,040\,421\,223\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2009, } Y &= \text{Rp } 801\,692\,374,6 + \text{Rp } 123\,872\,884,84 \text{ (11)} \\ &= \text{Rp } 801\,692\,374,6 + \text{Rp } 1\,362\,601\,733,24 \\ &= \text{Rp } 2\,164\,244\,108,84\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2010, } Y &= \text{Rp } 801\,692\,374,6 + \text{Rp } 123\,872\,884,84 \text{ (12)} \\ &= \text{Rp } 801\,692\,374,6 + \text{Rp } 1\,486\,474\,618,08 \\ &= \text{Rp } 2\,288\,166\,993,68\end{aligned}$$

Setelah prediksi pendapatan dari laba BUMD untuk tahun 2001-2005 diketahui kemudian dibuat penerapan garis trend yang dapat dilihat pada grafik 5.9 berikut ini:

Grafik 5.9
Prediksi Pendapatan Laba Dari BUMD
Tahun Anggaran 2001-2010



4. Prediksi Pendapatan Lain-lain Tahun 2001-2010

Untuk mencari persamaan $Y = a + bX$ digunakan tabel 5.11

Tabel 5.11

Perhitungan Trend Pendapatan Lain-lain

Th. Anggaran	X	Y	XY	X ²
1996/1997	-2	457 672 886,17	-951 345 772,34	4
1997/1998	-1	327 796 749,72	-327 796 749,34	1
1998/1999	0	1 171 106 365,07	0	0
1999/2000	1	1 126 584 687,35	1 126 584 687,35	1

2000	2	2 266 908 515,55	4 533 817 031,11	4
Jumlah	0	5 268 069 223,86	4 381 259 196,39	10

Dari tabel tersebut di atas kemudian dicari persamaan $Y = a + b X$

$$a = \frac{\Sigma Y}{n}$$

$$= \frac{Rp5268069223,86}{5}$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{X^2}$$

$$= \frac{Rp4381259196,39}{10}$$

$$= Rp4381259,639$$

Setelah nilai a dan b diketahui kemudian dibuat persamaan yaitu

$$Y = Rp 1 053 613 840,77 + Rp 4 381 259 639 X$$

Dari persamaan tersebut di atas kemudian dibuat prediksi pendapatan dari penerimaan lain-lain untuk tahun anggaran 2000-2010.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2001, } Y &= Rp 1 053 613 840,77 + Rp 4 381 259,639 (3) \\ &= Rp 1 053 613 840,77 + Rp 13 143 778,917 \\ &= Rp 1 066 757 619,642 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2002, } Y &= Rp 1 053 613 840,77 + Rp 4 381 259,639 (4) \\ &= Rp 1 053 613 840,77 + Rp 17 525 038,556 \\ &= Rp 1 071 138 879,324 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2003, } Y &= Rp 1 053 613 840,77 + Rp 4 381 259,639 (5) \\ &= Rp 1 053 613 840,77 + Rp 21 906 298,195 \\ &= Rp 1 075 520 138,965 \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2004, } Y = \text{Rp } 1\,053\,613\,840,77 + \text{Rp } 4\,381\,259,639 \text{ (6)}$$

$$= \text{Rp } 1\,053\,613\,840,77 + \text{Rp } 26\,887\,557,834$$

$$= \text{Rp } 1\,079\,901\,398,607$$

$$\text{Tahun 2005, } Y = \text{Rp } 1\,053\,613\,840,77 + \text{Rp } 4\,381\,259,639 \text{ (7)}$$

$$= \text{Rp } 1\,053\,613\,840,77 + \text{Rp } 30\,668\,813$$

$$= \text{Rp } 1\,084\,282\,653,773$$

$$\text{Tahun 2006, } Y = \text{Rp } 1\,053\,613\,840,77 + \text{Rp } 4\,381\,259,639 \text{ (8)}$$

$$= \text{Rp } 1\,053\,613\,840,77 + \text{Rp } 35\,050\,077,12$$

$$= \text{Rp } 1\,088\,663\,917,84$$

$$\text{Tahun 2007, } Y = \text{Rp } 1\,053\,613\,840,77 + \text{Rp } 4\,381\,259,639 \text{ (9)}$$

$$= \text{Rp } 1\,053\,613\,840,77 + \text{Rp } 39\,431\,336,76$$

$$= \text{Rp } 1\,093\,045\,177,53$$

$$\text{Tahun 2008, } Y = \text{Rp } 1\,053\,613\,840,77 + \text{Rp } 4\,381\,259,639 \text{ (10)}$$

$$= \text{Rp } 1\,053\,613\,840,77 + \text{Rp } 43\,8125\,906,40$$

$$= \text{Rp } 1\,097\,426\,436,17$$

$$\text{Tahun 2009, } Y = \text{Rp } 1\,053\,613\,840,77 + \text{Rp } 4\,381\,259,639 \text{ (11)}$$

$$= \text{Rp } 1\,053\,613\,840,77 + \text{Rp } 48\,193\,856,04$$

$$= \text{Rp } 1\,101\,807\,696,81$$

$$\text{Tahun 2010, } Y = \text{Rp } 1\,053\,613\,840,77 + \text{Rp } 4\,381\,259,639 \text{ (12)}$$

$$= \text{Rp } 1\,053\,613\,840,77 + \text{Rp } 52\,575\,115,68$$

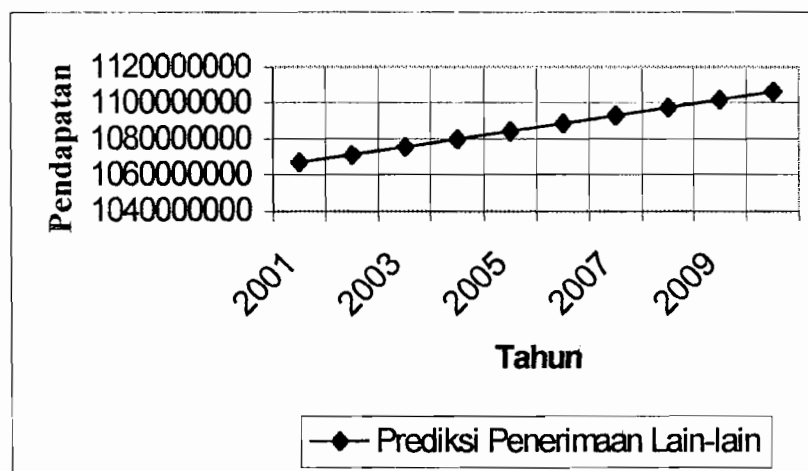
$$= \text{Rp } 1\,106\,188\,956,45$$

Setelah prediksi penerimaan pendapatan lain-lain untuk tahun 2001-2002 diketahui kemudian penerapan garis trend yang dapat dilihat pada grafik 5.10 berikut ini:

Grafik 5.10

Prediksi penerimaan Lain-Lain

Tahun 2001-2010



Dari persamaan-persamaan pos tersebut di atas dibuat prediksi penerimaan PAD untuk tahun 2001-2010

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2001} &= \text{Rp } 15\,551\,660\,419,4 + \text{Rp } 5\,983\,865\,763,64 + \text{Rp } 1\,173 \\ &\quad 311\,024,12 + \text{Rp } 1\,066\,757\,619,64 \\ &= \text{Rp } 22\,051\,957\,477,6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2002} &= \text{Rp } 18\,430\,876\,714,2 + \text{Rp } 6\,090\,114\,642,83 + \text{Rp } 1\,297 \\ &\quad 183\,913,96 + \text{Rp } 1\,075\,520\,138,965 \\ &= \text{Rp } 27\,493\,695\,409,96 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2003} &= \text{Rp } 21\,316\,093\,005,00 + \text{Rp } 7\,396\,363\,521,63 + \text{Rp } 1\,421 \\ &\quad 056\,798,8 + \text{Rp } 1\,075\,520\,188,96 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 32\,203\,033\,464,4$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2004} &= \text{Rp } 24\,198\,309\,303,8 + \text{Rp } 8\,120\,612\,400,43 + \text{Rp } 1\,544 \\ &\quad 929\,683,04 + \text{Rp } 1\,079\,901\,398,60 \\ &= \text{Rp } 34\,916\,752\,786,48 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2005} &= \text{Rp } 27\,068\,525\,598,6 + \text{Rp } 8\,808\,861\,279,23 + \text{Rp } 1\,668 \\ &\quad 802\,568,48 + \text{Rp } 1\,084\,282\,653,77 \\ &= \text{Rp } 38\,630\,472\,100,08 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2006} &= \text{Rp } 29\,947\,741\,898,4 + \text{Rp } 9\,515\,110\,157,19 + \text{Rp } 1\,792 \\ &\quad 675\,453,32 + \text{Rp } 1\,088\,663\,917,84 \\ &= \text{Rp } 42\,344\,191\,426,75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2007} &= \text{Rp } 32\,826\,957\,788,20 + \text{Rp } 10\,221\,359\,035,66 + \text{Rp } 1\,916 \\ &\quad 548\,339,16 + \text{Rp } 1\,093\,045\,177,53 \\ &= \text{Rp } 46\,057\,909\,740,45 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2008} &= \text{Rp } 35\,706\,174\,483 + \text{Rp } 10\,927\,607\,914,33 + \text{Rp } 2\,046\,421 \\ &\quad 223,00 + \text{Rp } 1\,097\,426\,736,17 \\ &= \text{Rp } 49\,717\,630\,056,50 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2009} &= \text{Rp } 38\,585\,390\,777,80 + \text{Rp } 11\,633\,856\,793,00 + \text{Rp } 2\,164 \\ &\quad 294\,108,84 + \text{Rp } 1\,101\,807\,696,81 \\ &= \text{Rp } 53\,485\,449\,376,45 \end{aligned}$$

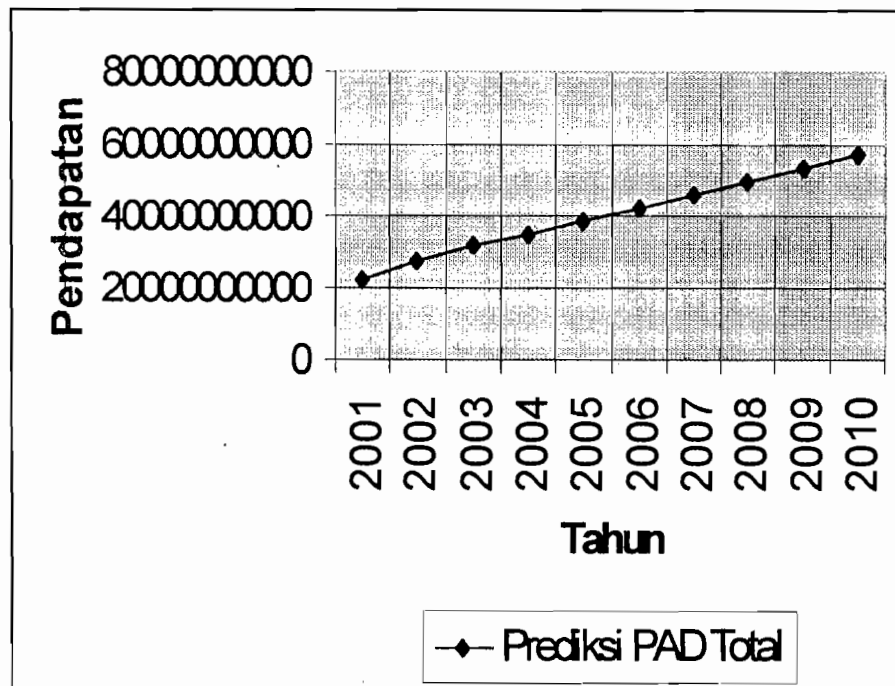
$$\begin{aligned} \text{Tahun 2010} &= \text{Rp } 41\,464\,007\,072,60 + \text{Rp } 12\,340\,105\,671,67 + \text{Rp } 2\,288 \\ &\quad 166\,993,68 + \text{Rp } 1\,106\,188\,956,45 \\ &= \text{Rp } 57\,198\,468\,698,30 \end{aligned}$$

Setelah diketahui jumlah penerimaan PAD total dalam trend untuk tahun 2001-2010 kemudian dibuat penerapan garis trend yang dapat dilihat dalam garfik 5.11

Garfik 5.11

Prediksi PAD Total

Tahun 2001-2010



Dilihat dari prediksi pendapatan asli daerah secara keseluruhan dalam setiap tahunnya diharapkan semakin meningkat. Jika dilihat pertumbuhannya terlihat menurun dari 26% turun 14% dan 12%.

Untuk lebih jelasnya peranan PAD dalam APBD dapat dilihat juga perkiraan penerimaan APBDnya.

Tabel 5.12

Perhitungan Trend Pendapatan APBD

Th. Anggaran	X	Y	XY	X ²
1996/1997	-2	72 061 104 085,85	-144 122 208 171,70	4
1997/1998	-1	90 241 670 203,13	-90 241 670 203,13	1
1998/1999	0	96 078 447 422,55	0	0
1999/2000	1	28 137 559 870,93	28 137 559 870,93	1
2000	2	118 121 253 427,29	236 242 506 854,4	4
Jumlah	0	406 640 935 009,75	30 016 188 350,5	10

Dari tabel tersebut di atas kemudian dicari nilai persamaan $Y = a + b X$

$$a = \frac{\Sigma Y}{n}$$

$$a = \frac{30\,016\,188\,350,5}{5}$$

$$= \text{Rp } 600\,323\,670,1$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

$$b = \frac{406\,640\,035\,009,75}{10}$$

$$= 40\,664\,003\,500,975$$

Setelah diketahui nilai a dan b, kemudian dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 40\,664\,003\,500,9 (X)$$

Dari persamaan tersebut kemudian dibuat prediksi untuk tahun anggaran

2001-2010

$$\text{Tahun 2001, } Y = \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 40\,664\,003\,500,9 \text{ (3)}$$

$$= \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 121\,992\,010\,502,9$$

$$= \text{Rp } 122\,592\,334\,173$$

$$\text{Tahun 2002, } Y = \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 40\,664\,003\,500,9 \text{ (4)}$$

$$= \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 162\,656\,014\,003,9$$

$$= \text{Rp } 163\,256\,337\,674$$

$$\text{Tahun 2003, } Y = \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 40\,664\,003\,500,9 \text{ (5)}$$

$$= \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 203\,984\,021\,005,8$$

$$= \text{Rp } 203\,920\,341\,175$$

$$\text{Tahun 2004, } Y = \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 40\,664\,003\,500,9 \text{ (6)}$$

$$= \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 243\,984\,021\,005,8$$

$$= \text{Rp } 244\,584\,344\,675,9$$

$$\text{Tahun 2005, } Y = \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 40\,664\,003\,500,9 \text{ (7)}$$

$$= \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 284\,648\,024\,506,8$$

$$= \text{Rp } 285\,248\,348\,176,9$$

$$\text{Tahun 2006, } Y = \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 40\,664\,003\,500,9 \text{ (8)}$$

$$= \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 325\,312\,028\,007,8$$

$$= \text{Rp } 325\,912\,351\,677,9$$

$$\text{Tahun 2007, } Y = \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 40\,664\,003\,500,9 \text{ (9)}$$

$$= \text{Rp } 600\,232\,670,1 + \text{Rp } 365\,976\,031\,507,7$$

$$= \text{Rp } 366\,576\,355\,178,8$$

$$\text{Tahun 2008, } Y = \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 40\,664\,003\,500,9 \text{ (10)}$$

$$= \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 406\,640\,035\,009,7$$

$$= \text{Rp } 407\,240\,358\,679,8$$

$$\text{Tahun 2009, } Y = \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 40\,664\,003\,500,9 \text{ (11)}$$

$$= \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 447\,304\,338\,510,7$$

$$= \text{Rp } 447\,904\,362\,180,8$$

$$\text{Tahun 2010, } Y = \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 40\,664\,003\,500,9 \text{ (12)}$$

$$= \text{Rp } 600\,323\,670,1 + \text{Rp } 487\,968\,042\,011,6$$

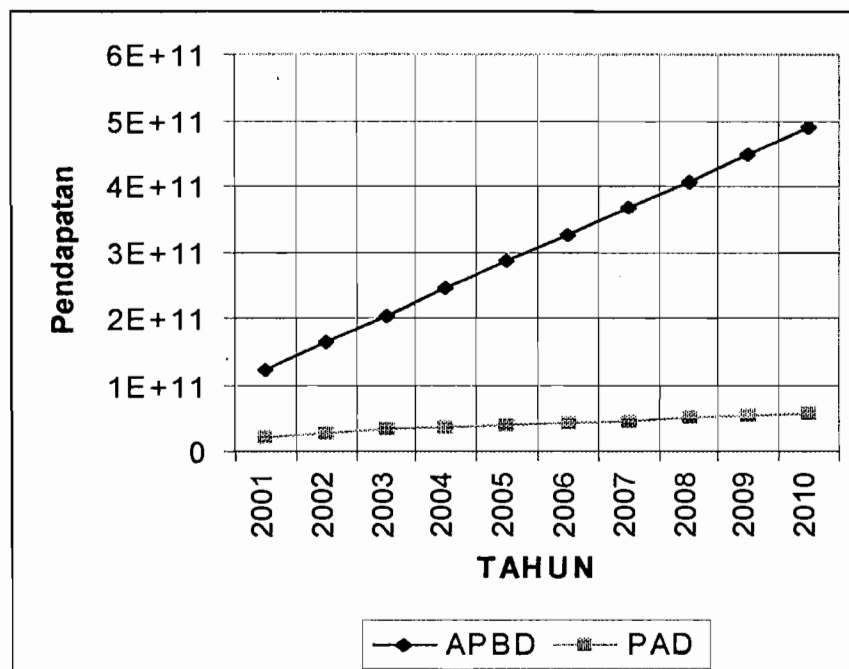
$$= \text{Rp } 488\,568\,365\,681,7$$

Setelah prediksi pendapatan retribusi daerah pada tahun 2001-2010 diketahui, kemudian dibuat garis penerapan dalam trend yang ditunjukkan dalam grafik 5.12 berikut ini:

Grafik 5.12

Perkembangan PAD Total dan APBD

Tahun anggaran 2001-2010



Dengan melihat perkembangan PAD dan APBD dari tabel di atas sampai dengan tahun anggaran 2010 pendapatan asli daerah belum mencukupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Meskipun penerimaan pendapatan asli daerah dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi perkembangan jumlah penerimaan APBD juga semakin besar.

Dengan demikian jika Kabupaten Sleman akan melaksanakan otonomi daerah dan hanya mengandalkan penerimaan pendapatan asli daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah masih sulit.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sampai dengan tahun 2000 kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD di Kabupaten Sleman masih relatif rendah yaitu 12,9 % sampai dengan 16%. Dengan melihat perkembangan PADnya maka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman masih mengandalkan sumber pembiayaan dari luar PAD. Dengan kata lain, PAD Kabupaten Sleman belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah.
2. Prediksi PAD dan APBD Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2010 menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD belum memungkinkan untuk pelaksanaan otonomi daerah secara mandiri karena pertumbuhan APBD lebih tinggi yaitu 33% pada tahun 2001/2002, 25% pada tahun 2002/2003, dan pada tahun 2009/2010 sebesar 22% sedangkan pertumbuhan PAD pada tahun 2001/2002 yaitu 25%, 17% pada tahun 2002/2003 dan pada tahun 2009/2010 sebesar 7%.

3. Faktor-faktor dominan dalam pembentukan penerimaan PAD di Kabupaten Sleman adalah sektor pajak dan retribusi. Sektor pajak menyumbang rata-rata 68 % dan sektor retribusi 4% dari PAD.
4. Perkembangan pendapatan asli daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan penurunan pada sektor-sektor:

- a. Pajak daerah

Pajak daerah mengalami penurunan dalam realisasi pada setiap tahunnya hal ini disebabkan karena pada tahun 1998 berdasarkan undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah banyak sektor pajak dan retribusi dihapus/dihilangkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada sekarang ini dan ada pos yang ditambahkan yang dianggap lebih menguntungkan.

- b. Retribusi daerah

Dari penerimaan retribusi daerah dalam setiap tahunnya juga mengalami penurunan dalam realisasi dimana realisasinya tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Pada tahun 1998/1999 kenaikan terjadi karena adanya peningkatan dari sektor TPR/non bus, sedangkan pada tahun 2000 kenaikan terjadi karena hampir semua jenis retribusi mengalami peningkatan seperti peningkatan retribusi pelayanan kesehatan, parkir, pengujian kendaraan bermotor, IMB, penggunaan tanah, pengajuan cetak KTP, rumah potong hewan, dan ijin gangguan.

c. Dari penerimaan bagian laba BUMD

Dari penerimaan bagian laba BUMD tahun ketahun mengalami peningkatan dalam realisasinya. Meskipun pada tahun 1999/2000 mengalami penurunan karena PDAM yang telah dianggarkan tetapi dalam realisasinya tidak ada sama sekali dimana pada saat itu PDAM mengalami keterbatasan modal dan hanya bisa mencukupi kebutuhan operasionalisasi PDAM.

d. Penerimaan lain-lain.

Dalam penerimaan lain-lain dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan kenaikan tetapi mulai tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2000 selalu mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena ada beberapa sektor yang sebelumnya tidak dianggarkan tetapi dalam realisasinya lebih besar. Sektor yang menyebabkan kenaikan penerimaan adalah adanya sumbangan dari pihak ketiga, setoran kelebihan dari pembayaran dan meningkatnya pemakaian jasa giro

B. SARAN

1. Dengan melihat kondisi yang ada dimana jumlah PAD sampai dengan tahun 2010 belum mencukupi kebutuhan pemerintah daerah maka diharapkan pemerintah daerah dapat menekan belanja daerah untuk pos belanja lain-lain, pos sumbangan, dan pos belanja barang-barang. Dimana lebih baik digunakan untuk penambahan pos pemeliharaan kekayaan daerah.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan pendapatan asli daerah aparatur dinas pendapatan daerah dituntut untuk dapat mengembangkan administrasi dan operasionalisasi secara profesional dan secara optimal dengan memperhatikan faktor kecepatan pelayanan, keamanan, kemudahan serta kepuasan masyarakat.
3. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak terutama pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, pihak pemerintah daerah supaya lebih meningkatkan promosi pariwisata.
4. Perlu diperhatikan pula beban yang harus di tanggung masyarakat dalam pembiayaan pemerintah agar jangan sampai masyarakat resah dengan banyaknya pungutan untuk pembangunan daerah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Djoefi, 1994. *Pokok-pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah*, Jakarta: Cipta Rukun Sarana.
- BPS, 1999. *Kabupaten Sleman dalam Angka 1999*, Yogyakarta: BPS.
- Devas, Nick, 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI-Perss.
- Devey. K. J, 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta: UI-Perss.
- Halim, Abdul, 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1995, *Standar Akuntansi Keuangan* , Jakarta: Salemba Empat.
- Kakisina, S. dan A. Rumansara, 2000. Otonomi Daerah: Desentralisasi Pemerintah sebagai Tuntutan Demokrasi Politik dan Ekonomi yang Berkeadilan?, *Kritis*. (Maret : 54-77)
- Labadjo, Sjachbuddin, 2001. *Donggala Memacu Potensi Pertanian dalam Otonomi Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mamesah, D. J, 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maskun, Sumitro, 2001. *Titik Berat Otonomi Pada DATI II dalam Otonomi Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, dkk, 1985. *Rumus-Rumus Statistik Serta Penerapannya*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Republik Indonesia, 1999. *Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: CV. Tamita Utama.
- Republik Indonesia, 1999. *Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta: CV. Tamita Utama.

Silalahi, T.B, 2001. Otonomi Ditinjau dari Aspek Sumber Daya Manusia dalam *Otonomi Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan.

Suparmoko, M, 1987. *Keuangan Negara*, Yogyakarta: BPFE.

Supranto, J, 1989. *Statistik Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Erlangga

LAMPIRAN

NO.	JENIS	1993/1994		1994/1995		1995/1996		1996/1997		1997/1998		1998/1999		KETERANGAN
		Target 3	Realisasi 4	Target 5	Realisasi 6	Target 7	Realisasi 8	Target 9	Realisasi 10	Target 11	Realisasi 12	Target	Realisasi	
	REKAB													
	PENDAPATAN ASLI DAERAH													
	Pos 1.2.1 Pajak Daerah	1.429.900.000.00	1.402.995.137.27	2.186.850.000.00	2.294.602.398.84	3.784.900.000.00	3.950.032.991.25	5.802.800.000.00	4.904.287.863.05	7.124.600.000.00	6.307.084.984.82	7.687.881.489.50	7.229.182.708.87	
	Pos 1.2.2 Retribusi Daerah	1.248.450.000.00	1.318.889.012.00	1.822.300.000.00	1.752.651.285.00	2.441.850.000.00	2.340.639.446.00	2.734.280.000.00	2.523.970.420.00	3.843.690.000.00	3.450.573.395.00	3.407.050.940.00	3.498.829.646.00	
	Pos 1.2.3 Bagian Laba BUMD	122.941.712.00	168.242.204.00	81.800.000.00	116.071.247.00	223.058.282.21	294.254.422.31	442.864.579.33	570.968.969.33	673.000.000.00	708.029.761.57	880.999.000.00	883.219.551.51	
	Pos 1.2.4 Penerimaan Dinas	431.000.000.00	408.703.510.00	438.250.000.00	400.930.825.00	470.300.000.00	435.858.600.00	1.819.143.640.00	2.099.323.521.79	2.577.850.000.00	2.671.416.398.79	2.036.323.581.50	2.136.078.766.55	
	Pos 1.2.5 Penerimaan Lain-lain	236.306.035.00	175.402.212.17	504.900.000.00	604.165.552.85	516.692.000.00	421.551.999.28	645.734.000.00	475.672.886.17	808.000.000.00	327.798.749.72	422.273.000.00	1.071.106.365.07	
	Jumlah APBD	21.553.585.622.10	21.381.009.721.54	24.436.888.433.01	26.149.318.718.70	42.530.527.777.58	32.795.128.549.36	72.221.752.212.44	72.061.104.085.85	85.535.920.023.56	90.241.670.203.13	95.805.613.560.47	98.078.477.422.55	
	JUMLAH PADS	3.466.697.747.00	3.487.932.076.44	4.833.500.000.00	5.168.421.306.69	7.436.598.262.21	7.442.337.458.84	11.444.822.219.33	10.574.223.660.34	14.825.140.000.00	13.464.881.289.90	14.414.507.991.00	14.786.415.038.00	

Slleman, 1999

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Dati II Sleman

DRS. ISWOYO HADIWARNO
Pembina Gol. IV/a
NIP 010 162 497

REALISASI PAD
TAHUN 1999/2000 DAN TAHUN 2000
S/d Bulan : Desember 2000

AYAT	URAIAN	TARGET 1999/2000	REALISASI 1999/2000	%	AYAT	URAIAN	TARGET 2000	REALISASI 2000	%
121	POS PAJAK :				121	POS PAJAK :			
004	Pajak Hotel & Restouran	3,700,000,000.00	3,036,303,229.77	82.06%	004	Pajak Hotel & Restouran	3,800,000,000.00	4,910,425,068.24	129.22%
005	Pajak Hiburan	200,000,000.00	177,692,242.00	88.85%	005	Pajak Hiburan	200,000,000.00	334,182,288.55	167.08%
006	Pajak Reklame	411,633,333.00	233,508,548.09	56.73%	006	Pajak Reklame	308,725,000.00	315,077,374.70	102.06%
007	Pajak Penerangan Jalan	3,600,000,000.00	2,350,715,993.00	65.30%	007	Pajak Pen. Jalan	2,700,000,000.00	3,290,297,779.00	121.86%
008	Pajak Peng. Gal. Gol. C	35,000,000.00	58,778,758.00	167.93%	008	Pajak Peng. Gal. Gol. C	62,000,000.00	62,984,858.75	101.59%
009	Pajak Pemanfaatan ABT	865,000,000.00	670,510,563.60	77.52%	009	Pajak Pemanfaatan ABT	675,298,908.00	689,067,638.45	102.04%
	Jumlah Pajak	8,811,633,333.00	6,527,507,332.66	74.08%		Jumlah Pajak	7,746,023,908.00	9,602,014,787.69	123.96%
122	POS RETRIBUSI :				122	POS RETRIBUSI :			
001	Ret. Pely. Kesehatan	2,658,600,000.00	2,064,854,423.00	77.67%	001	Ret. Pely. Kesehatan	2,903,700,000.00	2,945,419,614.00	101.44%
002	Ret. Pel. Persampahan	136,000,000.00	102,658,900.00	75.48%	002	Ret. Pel. Persampahan	150,200,000.00	133,448,100.00	88.85%
003	Ret. Peng. B.Cetak KTP & ACP	238,750,000.00	193,989,500.00	81.25%	003	Ret. Peng. B.Cetak KTP & ACP	222,149,779.00	227,149,779.00	101.98%
005	Ret. Parkir	80,000,000.00	59,919,854.60	74.90%	005	Ret. Parkir	90,000,000.00	92,645,050.00	102.94%
006	Ret. Pasar	866,000,000.00	646,993,275.00	74.71%	006	Ret. Pasar	888,104,700.00	795,206,600.00	89.54%
008	Ret. Peng. Kend. Bermotor	90,001,800.00	73,250,550.00	81.39%	008	Ret. Peng. Kend. Bermotor	74,013,500.00	89,075,550.00	120.35%
012	Ret. Peng. Kekayaan Daerah	44,020,000.00	32,180,800.00	73.10%	012	Ret. Peng. Kekayaan Daerah	40,113,900.00	40,543,000.00	101.07%
014	Ret. Terminal	99,900,000.00	76,532,500.00	76.61%	014	Ret. Terminal	76,525,000.00	73,520,600.00	96.07%
019	Ret. Rumah Potong Hewan	15,630,000.00	10,697,475.00	68.44%	019	Ret. Rumah Potong Hewan	11,718,000.00	11,719,500.00	100.01%
021	Ret. T. Rekreasi & O. Raga	506,000,000.00	375,236,029.90	74.16%	021	Ret. T. Rekreasi & O. Raga	459,500,000.00	436,535,394.60	95.00%
024	Ret. Penj. Produksi Ush Daerah	155,300,000.00	101,482,000.00	65.35%	024	Ret. Penj. Produksi Ush Daerah	197,200,200.00	188,858,500.00	95.77%
025	Ret. Izin Peng. Tanah	50,000,000.00	32,395,450.00	64.79%	025	Ret. Izin Peng. Tanah	50,000,000.00	51,703,850.00	103.41%
026	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	305,000,000.00	277,710,935.00	91.05%	026	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	315,000,000.00	394,452,978.00	125.22%
028	Ret. Izin Gangguan	160,000,000.00	157,259,000.00	98.29%	028	Ret. Izin Gangguan	150,000,000.00	194,570,000.00	129.71%
029	Ret. Izin Trayek	2,500,000.00	2,280,000.00	91.20%	029	Ret. Izin Trayek	2,280,000.00	1,935,000.00	84.87%
	Jumlah	5,407,701,800.00	4,207,440,692.50	77.80%		Jumlah	5,631,105,300.00	5,676,781,484.60	100.81%
123	POS BAGI LABA BUMD				123	POS BAGI LABA BUMD			
001	BPD DIY	403,122,161.51	603,790,832.33	149.78%	001	BPD DIY	699,000,000.00	678,583,338.17	97.08%
002	PD. BPR Bank Pasar	345,000,000.00	0.00	0.00%	002	PD. BPR Bank Pasar	563,000,000.00	563,869,620.00	100.15%
003	PDAM	125,000,000.00	0.00	0.00%	003	PDAM			
	Jumlah	873,122,161.51	603,790,632.33	69.15%		Jumlah	1,262,000,000.00	1,242,452,958.17	98.45%
124	POS PENERIMAAN LAIN-LAIN				124	POS PENERIMAAN LAIN-LAIN			
001	Pejualan Kekayaan Daerah	8,000,000.00	5,256,000.00	87.60%	001	Penjualan Kekayaan Daerah	41,674,743.00	18,583,100.00	44.59%
002	Jasa Giro	288,051,734.00	144,183,549.50	50.40%	002	Jasa Giro	268,500,000.00	341,860,976.00	127.32%
003	Sumbangan Pihak Ke III	86,500,000.00	90,180,000.00	104.25%	003	Sumbangan Pihak Ke III			
009	Penerimaan Sisa UUDP	0.00	391,584,148.44	ERR	009	Penerimaan Sisa UUDP	0.00	853,666,810.55	ERR
010	Penjualan Dokumen Lelang	45,000,000.00	0.00	0.00%	010	Penjualan Dokumen Lelang			
011	Strn Kelebihan Dr Pembayaran	0.00	88,314,225.66	ERR	011	Strn Kelebihan Dr Pembayaran	0.00	28,012,024.00	ERR
012	Penerimaan Penguatan Modal	80,000,000.00	60,000,000.00	75.00%	012	Penerimaan Penguatan Modal	232,500,000.00	225,700,000.00	97.08%
030	Lain-Lain Pendapatan	276,500,000.00	347,086,763.75	125.53%	030	Lain-Lain Pendapatan	648,083,000.00	799,085,705.00	123.30%
	Jumlah	780,051,734.00	1,126,584,687.35	144.42%		Jumlah	1,190,757,743.00	2,266,908,515.55	190.38%
	Jumlah PAD	15,872,509,028.51	12,465,323,344.84	78.53%		Jumlah PAD	15,829,886,951.00	18,788,157,746.01	118.69%

AYAT	URAIAN	TARGET 1999/2000	REALISASI 1999/2000	%	AYAT	URAIAN	TARGET 2000	REALISASI 2000	%
131	POS BAGI HASIL PAJAK				131	POS BAGI HASIL PAJAK			
001	Pajak Bumi dan Bangunan	4,979,017,380.00	4,428,694,782.00	88.95%	001	Pajak Bumi dan Bangunan	4,428,694,782.00	6,854,362,030.63	154.77%
002	Bea P.Hak Atas Tanah & Bangunan	650,000,000.00	1,128,470,621.00	173.30%	002	Bea P.Hak Atas Tanah & Bangunan	1,128,470,621.00	1,638,371,093.00	145.27%
003	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	600,000,000.00	365,743,838.48	60.96%	003	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	700,000,000.00	2,171,435,181.15	310.21%
	Jumlah	6,229,017,380.00	5,920,909,241.48	95.05%		Jumlah	6,255,165,403.00	10,662,168,304.78	170.45%
132	POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK				132	POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK			
001	Iuran hasil Hutan	80,000,000.00	75,749,693.81	94.69%	001	Iuran hasil Hutan	up	119,341,680.50	ERR
003	Pemb. Hak Atas Tanah Negara	60,000,000.00	35,138,138.00	58.56%	003	Pemb. Hak Atas Tanah Negara	up	40,344,892.00	ERR
006	Sumb. Diversifikasi Cengkeh	18,795,150.00	18,795,150.00	100.00%	006	Sumb. Diversifikasi Cengkeh	up	0.00	ERR
007	Kompensasi Retribusi Ternak	1,104,500.00	0.00	0.00%	007	Kompensasi Retribusi Ternak	up	0.00	ERR
008	Penyisihan Ret. Tk. I Kpd. Desa	29,586,700.00	14,793,350.00	50.00%	008	Penyisihan Ret. Tk. I Kpd. Desa	39,568,140.00	39,568,140.00	100.00%
009	Penyisihan Penerimaan PBB Tk. I	61,433,790.00	30,716,896.00	50.00%	009	Penyisihan Penerimaan PBB Tk. I	61,433,790.00	61,433,790.00	100.00%
	Jumlah	250,920,140.00	175,191,225.61	69.82%		Jumlah	101,001,930.00	260,688,502.50	258.10%
133	POS SUBSIDI DAERAH OTONOM				133	POS SUBSIDI DAERAH OTONOM			
001	Subsidi Belanja Pegawai	84,407,918,000.00	0.00	0.00%	001	Subsidi Belanja Pegawai	80,442,150,000.00	67,823,582,432.00	84.31%
002	Subsidi Belanja Non Pegawai	2,055,111,000.00	1,578,320,500.00	76.80%	002	Subsidi Belanja Non Pegawai	1,850,880,000.00	1,904,794,242.00	102.91%
003	Sumbangan Lainnya Dr. Pemerintah	922,410,000.00	436,471,300.00	47.32%	003	Sumbangan Lainnya Dr. Pemerintah	651,789,000.00	646,763,200.00	99.23%
	Jumlah	87,385,439,000.00	2,014,791,800.00	2.31%		Jumlah	82,944,819,000.00	70,375,139,874.00	84.85%
134	POS BANTUAN PEMBANGUNAN				134	POS BANTUAN PEMBANGUNAN			
001	Bantuan Pembangunan Daerah	16,607,951,000.00	7,556,642,800.00	45.50%	001	Bantuan Pembangunan Daerah	22,715,501,250.00	18,029,821,000.00	79.37%
	Jumlah	16,607,951,000.00	7,556,642,800.00	45.50%		Jumlah	22,715,501,250.00	18,029,821,000.00	79.37%
	Pos Urusan Kas dan Perhitungan	6,583,200.00	4,701,459.00			POS URUSAN KAS & PERHIT.	6,899,710.00	5,278,000.00	76.50%
	Jumlah Bukan PAD	110,479,910,720.00	15,672,236,528.09	14.19%		Jumlah Bukan PAD	112,023,387,293.00	99,333,095,681.28	88.67%
	Jumlah Seluruhnya	126,352,419,748.51	28,137,559,870.93	22.27%		Jumlah Seluruhnya	127,853,274,244.00	118,121,253,427.29	92.39%

Sieman, Januari 2001

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sieman

Drs. Iswoyo Hadhwarno
Pembina Gol. IV/a
NIP 010 162 497

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 1996/1997-DESEMBER 2000
 (000 Rupiah)

No	URAIAN	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000	No	URAIAN	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
A	Penerimaan daerah	71.707.647	90.241.670	99.158.541	126.237.003	118.622.699	A	Pengeluaran Rutin	49.936.001	63.210.981	72.023.506	93.351.028	92.088.674
1.	Sisa Lebih Tahun Lalu	840.086	762.213	472.228	4.363.615	-	1.	Belanja Pegawai	40.561.842	52.523.034	59.578.590	76.956.578	74.564.921
2.	Bagian PAD	10.574.224	13.464.881	14.786.413	17.125.445	15.301.766	2.	Belanja Barang	2.701.646	361.835	6.103.291	7.940.053	10.960.636
	a. Pajak Daerah	4.904.288	6.307.065	7.229.183	9.185.909	7.279.302	3.	Biaya Pemeliharaan	611.974	66.255	681.176	999.248	901.759
	b. Retribusi	2.523.970	3.450.573	3.466.828	5.551.344	5.426.980	4.	Belanja Perjalanan	366.387	220.743	205.912	214.059	147.750
	c. Laba BUMD	570.696	708.029	883.219	1.262.000	1.262.000	5.	Belanja Lain-lain	4.599.211	4.980.342	3.832.318	4.588.924	3.724.603
	d. Penerimaan Dinas	2.099.324	2.671.416	213.077	-	-	6.	Angsuran Pinjaman/Bunga	180.469	234.717	119.165	440.356	187.518
	e. Penerimaan Lain-lain	475.673	327.798	171.106	1.659.401	1.336.167	7.	Ganjaran Subsidi Daerah Bawahan	493.708	697.732	1.043.751	984.328	973.022
3.	Bagian Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak	6.550.838	7.523.877	7.797.262	10.350.686	6.356.167	8.	Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	359.870	272.973	434.303	1.094.259	342.118
	a. Bagian Hasil Pajak	6.414.683	7.192.169	7.578.314	10.350.686	6.255.165	9.	Pengeluaran Tidak Terduga	60.894	2.350	25.000	133.223	276.347
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	136.155	331.708	218.948	318.855	101.002							

4.	Bagian Sumbangan dan Bantuan	53.318.021	68.194.279	76.102.638	94.397.257	96.964.766	B	Pengeluaran Pembangunan	19.563.841	26.557.713	22.771.472	27.001.264	26.534.025
	a. Sumbangan	41.832.759	53.096.108	61.021.580	78.219.932	75.523.791		1. Bidang Ekonomi	5.809.605	11.558.122	11.830.162	13.654.693	15.953.964
	b. Bantuan	11.485.262	15.098.171	15.081.058	16.177.932	20.440.975		2. Bidang Sosial	3.320.198	5.299.311	5.810.773	4.977.302	6.058.599
5.	Bagian Penerimaan Pembangunan	424.478	296.420	-	-	-		3. Bidang Umum	5.594.839	6.359.328	3.115.849	676.353	3.235.259
	a. Dana Pem-Pus	-	-	-	-	-		4. Subsidi Pembangunan daerah Bawahan	4.839.199	-	-	1.606.916	1.282.203
	b. Pinjaman PemDa.	424.478	296.420	-	-	-		5. PembKembali Pinjaman	0	-	-	-	-
	c. Pinjaman untuk BUMD	-	-	-	-	-	C	Urusan Kas dan Perhitungan	7.861.233	11.039.125	17.185.091	17.120.356	29.010.088
6.	Urusan Kas dan Perhitungan	7.855.669	11.038.005	17.185.091	17.120.356	20.010.088							
	Jumlah Penerimaan	79.563.316	101279.675	116343632	143.357.359	147.632.787		Jumlah Pengeluaran	77.361.075	100.807819	111.980069	137.472.648	147.632787

Sumber: BPS



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasmya No. 1 Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 868800 Fax. (0274) 869533



SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070/ X/ 1379/ 2001.

Menunjuk Surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta No. 113/PDI/FE/X/01 Tanggal 19 Oktober 2001 Hal : Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini kami tidak keberatan untuk :

1. Memberikan Persetujuan kepada :

N a m a : Maria Magdalena Sribejani NIM 972114204
Tingkat : S1
Univ./Akdm : Sanata Dharma Yogyakarta
Alamat : RT 01 RW 05, Logede Pejagoan Kebumen

2. Keperluan : Mengadakan Ijin Penelitian dengan judul

“PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP APBD TAHUN 1996- 2000 DI
KABUPATEN SLEMAN”

3. Lokasi : BKKD Kab. Sleman

4. Waktu : Mulai tanggal dikeluarkan s/d 23 - 12 - 2001

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Camat/Kades) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Sleman (c/q Bappeda Kab.Sleman).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian diharap Pejabat Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Kepada Yth.
Sdr. Maria Magdalena Sribejani
Tembusan dikirim kepada Yth. :

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 23- 10 - 2001

1. Ka. Din. Ketentraman & Ketertiban Sleman
2. Ka. BPKKD Kab. Sleman
3. Pertiinggal

A/n. Bupati Sleman
Ketua BAPPEDA Kabupaten Sleman
ub. Ka. Bid Penelitian, Pengemb, dan

Evaluasi

Drs. Suseno, Msi
NIP.490 017 824